

**PENGARUH KESULITAN KEUANGAN DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP
AGRESIVITAS PAJAK DENGAN CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

TESIS

DOSEN PEMBIMBING :

Prof. Dr. Sutrisno T., SE., Ak., M.Si

Dr.Dra. Endang Mardiaty, M.Si.,Ak

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Magister



Oleh :

RATIH PUJIRAHAYU NUGROHO

17002011011023

PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI

PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2019

LEMBAR IDENTITAS KOMISI PEMBIMBING DAN PENGUJI

Judul Tesis:

PENGARUH KESULITAN KEUANGAN DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Nama Mahasiswa : Ratih Pujirahayu Nugroho
NIM : 170020110111023
Program Studi : Magister Akuntansi

KOMISI PEMBIMBING

Ketua : Prof.Dr. Sutrisno T., SE., AK., M.Si.
Anggota : Dr. Dra. Endang Mardiaty, M.Si., Ak.

TIM DOSEN PENGUJI

Dosen Penguji 1 : Dr. Dra. Arum Prastiwi, M.Si.,Ak.
Dosen Penguji 2 : Abdul Ghofar, SE., M.Si.,DBA.,Ak.

Tanggal Ujian : 5 Juli 2021



a.n Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya
Ketua Program Magister Akuntansi,

Dr. Dra. Erwin Saraswati, M.Acc
NIP 196001241986012001

T E S I S

**PENGARUH KESULITAN KEUANGAN DAN MANAJEMEN LABA
TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN CORPORATE GOVERNANCE
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Oleh :

RATIH PUJIRAHAYU NUGROHO
170020110111023

telah dipertahankan di depan penguji
pada tanggal: **5 Juli 2021**
dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Pembimbing,



Prof. Dr. Sutrisno T., SE., AK., M.Si.
Ketua



Dr. Dra. Endang Mardiaty, M.Si., Ak.
Anggota

Mengetahui,

a.n. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya
Ketua Program Magister Akuntansi



Dr. Dra. Erwin Saraswati, M.Acc
NIP 196001241986012001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah Tesis dengan judul:

"PENGARUH KESULITAN KEUANGAN DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI"

Tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **Plagiasi**, maka saya bersedia menerima keputusan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya untuk menggugurkan Tesis ini dan mencabut gelar Magister yang telah saya peroleh, serta bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU NO. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 28 Juli 2021
Mahasiswa



Nama : Ratih Pujirahayu Nugroho
NIM : 170020110111023
Program Studi : Magister Akuntansi

RIWAYAT HIDUP

Ratih Pujirahayu Nugroho, lahir di Mataram tanggal 5 Juli 1994, anak pertama dari tiga bersaudara hasil pernikahan Agus Nugroho dan Yudanti Pratiwi. Menempuh Pendidikan tingkat sekolah dasar pada SD Negeri Tulusrejo 4 Malang. Setelah itu melanjutkan studi pada SMP Negeri 16 Malang, dan melanjutkan studi Pendidikan Sekolah Menengah Atas pada SMA Negeri 8 Malang. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi tingkat Strata Satu pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2013 sampai dengan 2017. Pada Juli 2017 hingga 2018 melanjutkan studi pendidikan profesi akuntansi (PPAk) dan bekerja sebagai junior audit pada PT Cipta Sarana Cindekia. Setelah menyelesaikan pendidikan profesi akuntansi (PPAk) melanjutkan studi Strata 2 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya pada tahun 2018-2021 dan pada desember 2018 hingga saat ini bekerja pada Bank NTB Syariah.

Malang, 5 Juli 2021

Penulis



UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT sebab atas rahmad dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul Pengaruh Kesulitan Keuangan dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak dengan *Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Sektor Manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2018). Tesis ini ditulis sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan akhir studi jenjang Strata-2, Program Magister Sains Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya doa, dukungan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang dengan tulus, banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan Tesis ini. Peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Sutrisno T., M.Si., Ak. sebagai ketua komisi pembimbing dan Dr.Dra. Endang Mardiyati. M.Si., Ak. sebagai anggota komisi pembimbing yang selama proses penulisan hingga penyelesaian tesis selalu memberikan arahan dan masukan dengan penuh kesabaran dan memberikan motivasi yang tinggi kepada peneliti.
2. Dr.Dra. Arum Prastiwi, M.Si., Ak selaku dosen penguji satu dan Abdul Ghofar., SE., M.Si., DBA., M.Acc., Ak. selaku dosen penguji dua yang turut meberikan saran dan masukan yang sangat berarti untuk perbaikan penulisan dan penyempurnaan tesis ini.
3. Rektor Universitas Brawijaya, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Ketua Program Magister Sains Akuntansi, serta Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu serta kepada karyawan yang telah banyak membantu peneliti selama peneliti menempuh studi di Universitas Brawijaya.

Malang, 5 Juli 2021

Penulis

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis dengan judul Pengaruh Kesulitan Keuangan dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak dengan *Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2018).

Penelitian ini dilatar belakangi dengan keinginan peneliti untuk mengetahui tindakan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia yang dipengaruhi oleh kesulitan keuangan dan manajemen laba dan diperlemah dengan adanya *corporate governance*. Harapan peneliti tentunya agar tulisan ini dapat memberikan sumbangsih dalam mencegah tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang mengalami kondisi kesulitan keuangan dan praktik-praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur khususnya, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih riil, serta diharapkan perusahaan dapat menerapkan *corporate governance* sehingga memberikan pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen dalam menyajikan informasi akuntansi.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak kekurangan tepatan penulisan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak agar tulisan ini dapat menjadi suatu karya yang bermanfaat bagi pembaca.

Malang, 5 Juli 2021

Penulis

ABSTRAK

Ratih Pujirahayu Nugroho: Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Pengaruh Kesulitan Keuangan dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak dengan *Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi. Ketua Komisi Pembimbing: Prof. Dr. Sutrisno T., SE., M.Si., Ak., Anggota Komisi Pembimbing: Dr.Dra. Endang Mardiaty, M.Si., Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara empiris pada hubungan kesulitan keuangan dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak serta pengaruh *corporate governance* pada kesulitan keuangan dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak. *Corporate governance* diprosikan sebagai keberadaan komisaris independent dan proporsi komite audit. Populasi penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2018. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan yaitu *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian ini menemukan bahwa kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Manajemen laba riil berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. *Corporate governance* tidak dapat memoderasi pengaruh kesulitan keuangan terhadap agresivitas pajak. *Corporate governance* tidak dapat memoderasi pengaruh manajemen laba riil terhadap agresivitas pajak.

Kata Kunci : Kesulitan Keuangan, Manajemen Laba Riil, Komisaris Independen, Komite Audit, Agresivitas Pajak.



ABSTRACT

Nugroho, Ratih Pujirahayu. Master Program in Accounting, Faculty of Economics and Business, Universitas Brawijaya. **The Effect of Financial Distress and Earnings Management on Tax Aggressiveness with Corporate Governance as the Moderating Variable.** Head of Advisory Commission: Prof. Dr. Sutrisno, T., SE., M.Si., Ak., Member of Advisory Commission: Dr. Dra. Endang Mardiyati, M.Si., Ak.

The purpose of this research is to empirically assess and analyze the effect of financial distress and earnings management on tax aggressiveness and the influence of corporate governance on the effect of financial distress and earnings management on tax aggressiveness. In this study corporate governance is proxied by the presence of independent commissioners and the proportion of audit committee. The population is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2017 to 2018, from which sample was selected using purposive sampling technique. The results of the Moderated Regression Analysis (MRA) indicate that financial distress positively affects tax aggressiveness and that real earnings management positively influences tax aggressiveness. Furthermore, corporate governance does not moderate the effect of either financial distress or real earnings management on tax aggressiveness

Keywords: financial distress, real earnings management, independent commissioner, audit committee, tax aggressiveness.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
RIWAYAT HIDUP	ii
UCAPAN TERIMAKASIH	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Motivasi Penelitian	10
1.3 Rumusan Masalah	12
1.4 Tujuan Penelitian	13
1.5 Kontribusi Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Teori Akuntansi Positif	16
2.2 Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>)	17
2.3 <i>Trade Off Theory</i>	18
2.4 Kesulitan Keuangan	19
2.5 Manajemen Laba	21
2.5.1 Manajemen Laba Riil	23
2.6 Agresivitas Pajak	26
2.7 <i>Corporate Governance</i>	26

2.7.1	Komisaris Independen	27
2.7.2	Komite Audit	28
2.8.	Penelitian Terdahulu	29
BAB III KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS		32
3.1	Kerangka Konseptual Penelitian	32
3.2	Pengembangan Hipotesis	35
3.2.1	Kesulitan Keuangan dan Agresivitas Pajak	35
3.2.2	Manajemen Laba dan Agresivitas Pajak	37
3.2.3	Peran Moderasi <i>Corporate Governance</i> Pada Pengaruh Kesulitan Keuangan Terhadap Agresivitas Pajak	38
3.2.4	Peran Moderasi <i>Corporate Governance</i> Pada Pengaruh Manajemen Laba Riil Terhadap Agresivitas Pajak	41
BAB IV METODE PENELITIAN		44
4.1.	Jenis Penelitian	44
4.2.	Populasi dan Sampel Penelitian	44
4.3.	Jenis dan Sumber Data	45
4.4.	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	45
4.4.1	Variabel Dependen	46
4.4.2	Variabel Independen	46
4.4.2.1	Kesulitan Keuangan	46
4.4.2.2	Manajemen Laba Riil	47
4.4.3	Variabel Moderasi	50
4.5	Metode Analisis Data	52
4.5.1	Uji Asumsi Klasik	52
4.5.1.1	Uji Normalitas	52
4.5.1.2	Uji Multikolinearitas	52
4.5.1.3	Uji Heterokedastisitas	53

4.5.1.4 Uji Autokorelasi	54
4.5.2 Analisis Statistik Deskriptif	54
4.5.3 Model Analisis Data	54
4.5.4 Kriteria Penerimaan atau Penolakan Hipotesis	56
BAB V PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
5.1. Penentuan Sampel	57
5.2. Hasil Regresi Model Pengukuran Manajemen Laba Riil	58
5.3. Hasil Regresi Linier Berganda	59
5.3.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	59
5.3.2 Hasil Uji Aumsi Klasik Analisis Regresi	61
5.3.3 Hasil dan Analisis Pengujian Hipotesis	68
5.4. Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis	74
5.4.1 Kesulitan Keuangan Mempengaruhi Perilaku Agresivitas Pajak	74
5.4.2 Manajemen Laba Riil Mempengaruhi Perilaku Agresivitas Pajak	76
5.4.3 Komisaris Independen (<i>Corporate Governance</i>) sebagai Variabel Moderasi Memperlemah Pengaruh Kesulitan Keuangan Terhadap Agresivitas Pajak	77
5.4.4 Komite Audit (<i>Corporate Governance</i>) sebagai Variabel Moderasi Memperlemah Pengaruh Kesulitan Keuangan Terhadap Agresivitas Pajak	78
5.4.5 Komisaris Independen dan Komite Audit (<i>Corporate Governance</i>) sebagai Variabel Moderasi Memperlemah Pengaruh Manajemen Laba Riil Terhadap Agresivitas Pajak	79
BAB VI PENUTUP	82
6.1. Kesimpulan	82
6.2. Implikasi Penelitian	83
6.3. Implikasi Teori	83

6.4. Implikasi Praktis 84

6.5. Implikasi Kebijakan 84

6.6. Keterbatasan dan Saran 85

DAFTAR PUSTAKA 86



DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Proses Seleksi Data Pengamatan	57
Tabel 5.2 Hasil Analisis Regresi Manajemen Laba Riil	58
Tabel 5.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	60
Tabel 5.4 Hasil Uji Normalitas	63
Tabel 5.5 Hasil Uji Multikolinearitas	65
Tabel 5.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)	66
Tabel 5.7 Hasil Regresi Linier Berganda	67
Tabel 5.8 Analisis Residual Variabel Moderasi	72
Tabel 5.9 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis	74



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2017 – 2018 1

Gambar 3.1 Model Kerangka Konseptual 35

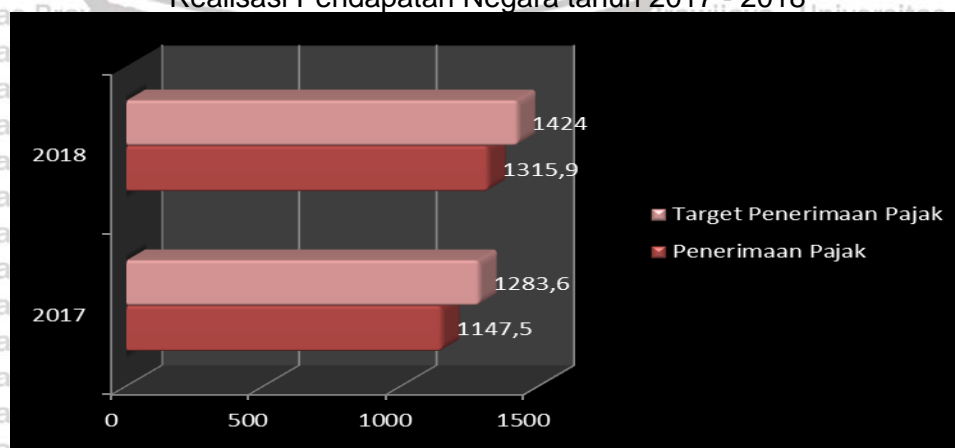


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peranan yang sangat penting sebagai sumber utama penerimaan negara. Berdasarkan UU Nomer 36 Tahun 2008 Pasal 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh. Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (2018) penerimaan pajak tahun 2017 sebesar Rp 1.147,5 triliun atau hanya terealisasi 89,4 % dari target yang telah ditetapkan pemerintah yaitu sebesar 1.283,6 triliun dan pada tahun 2018 penerimaan pajak sebesar Rp 1.315,9 triliun atau hanya terealisasi 92,24% dari target yang telah ditetapkan pemerintah yaitu sebesar 1.424 triliun. Data Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan bahwa jumlah usaha yang terdaftar sebagai wajib pajak tahun 2017 sebanyak 40 juta dan tahun 2018 sebesar 42 juta, namun badan usaha yang melaporkan SPT dan *E-Filing* tahun 2017 sebanyak 14 juta dan 2018 sebanyak 18 juta pelapor (Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, 2018).

Gambar 1.1
Realisasi Pendapatan Negara tahun 2017 - 2018



Sumber : Data diolah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018

Pemerintah melakukan pemungutan pajak untuk mendanai dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun bagi wajib pajak terutama wajib pajak badan, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi pendapatan perusahaan, sehingga wajib pajak memiliki kecenderungan untuk mengefisienkan beban pajak melalui tindakan agresivitas pajak. Menurut Chen *et al.* (2010) agresivitas pajak merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk menurunkan pendapatan kena pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang perpajakan. Tidak semua perusahaan berani mengambil strategi agresivitas pajak, dikarenakan terdapat resiko berupa sanksi pajak. Apabila perusahaan terbukti melakukan agresivitas pajak maka perusahaan harus melunasi biaya pajak yang terhutang. Efek lainnya merugikan citra perusahaan dalam melakukan bisnis yang beretika dan menjunjung *corporate governance*.

Fenomena agresivitas pajak masih banyak terjadi dalam beberapa tahun terakhir. RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) yang merupakan asosiasi dari berbagai organisasi sektor industri kelapa sawit pada tahun 2018 diduga menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan kepada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan senilai Rp 8 miliar per tahun. RSPO merupakan perusahaan yang didirikan dan terdaftar di Swiss, beroperasi secara internasional dan bermarkas di Kuala Lumpur, Malaysia. RSPO sudah mendaftarkan sebagai BUT (Badan Usaha Tetap) di Indonesia, tetapi perusahaan hanya membayarkan PPh Pasal 21 (dari gaji karyawan) dan bukan dari pendapatan utama perusahaan (Amri, 2018). PT Adaro Energy Tbk. dalam kurun waktu 2009-2017 memindahkan pendapatan tambang ke jaringan perusahaan di luar negeri. Melalui entitas anak perusahaannya di Singapura yaitu *Coaltrade Services International*, PT Adaro Energy Tbk. memindahkan sejumlah besar uangnya melalui suaka pajak (Friana, 2019). Terdapat kasus lain

dalam penghindaran pajak tahun 2017 yakni kasus tranfer dana *Standart Chartered* sebesar USD 1,4 miliar atau setara Rp 18,9 triliun ditranfer ke 81 warga Indonesia dari Guernsey, kawasan bebas pajak di Inggris. Diketahui dari 81 WNI, 62 orang diantaranya mengikuti program *Tax Amnesty*.

Fenomena agresivitas pajak dapat dijelaskan dengan teori akuntansi positif yang dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman (1990) yang menjelaskan dan memprediksi praktik-praktik akuntansi yang didasarkan pada asumsi bahwa manajer, pemegang saham, dan regulator (politisi) berusaha untuk memaksimalkan *utility* yang secara langsung terkait dengan kompensasi dan kemakmuran mereka. Perusahaan atau manajemen cenderung melaporkan laba secara hati-hati untuk menghindari pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah sehingga manajemen akan berusaha untuk memanfaatkan celah perpajakan untuk mengurangi pajak yang dibayarkan.

Perusahaan yang secara agresif mengefisienkan beban pajaknya dapat menjadi indikasi bahwa perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan.

Perusahaan dikatakan mengalami kesulitan keuangan pada saat perusahaan tersebut tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi jadwal pembayaran kembali utang kepada kreditur saat jatuh tempo, sehingga menyebabkan kegiatan operasional perusahaan tidak berjalan lancar. Manajer akan berusaha mencari cara agar kegiatan operasional tetap berjalan yaitu dengan pendanaan melalui utang. Utang merupakan salah satu sumber pendanaan eksternal yang dapat membiayai aktivitas perusahaan. Salah satu alasan pemilihan utang sebagai sumber pendanaan adalah manfaat pajak. Pendanaan melalui utang akan memunculkan beban bunga, sehingga dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Modigliani dan Miller (1963) mengembangkan *trade-off theory* yang menunjukkan bahwa utang bermanfaat karena akan menimbulkan beban bunga sehingga dapat mengurangi penghasilan kena pajak, akan tetapi semakin besar

utang maka beban yang harus ditanggung perusahaan juga semakin tinggi.

Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akan terdorong untuk melakukan penghindaran pajak guna mengurangi arus kas keluar dan beban perusahaan (Rani, 2017).

Beberapa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan diantaranya PT Lion Mentari Airlines mengalami kesulitan keuangan akibat tekanan industri penerbangan pada tahun 2018 akibat peningkatan biaya operasional yang ditunjukkan dengan penundaan pembayaran ke Angkasa Pura 1 (Styawan, 2019). PT Megalestari Unggul merupakan perusahaan rekanan KTP elektronik

tahun 2017 dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta dikarenakan perusahaan menunda kewajiban pembayaran utang sebesar Rp 376,84 miliar kepada empat krediturnya, sehingga seluruh kreditur menolak untuk perpanjangan masa restrukturisasi utang yang menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit. PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk (DAJK) merupakan perusahaan kemasan karton dan kertas di *delisting* dari Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 dikarenakan tidak mampu memenuhi pembayaran kembali utangnya kepada krediturnya yaitu PT Bank Mandiri sebesar Rp 414,26 miliar, Standar Chareterd Bank sebesar Rp 262,4 miliar, Bank Commenwealth sebesar Rp 50,4 miliar, Citibank N.A Rp 26,6 miliar, dan Bank Danamon Rp 9,9 miliar

Terdapat perbedaan pendapat dari para peneliti terkait kesulitan keuangan terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan penelitian Saputra *et al.* (2017), Putri dan Anis (2017), Richardson *et al.* (2015), Warsini *et al.* (2018)

terdapat hubungan positif antara kesulitan keuangan dan penghindaran pajak, ketika perusahaan mengalami kondisi kesulitan keuangan maka manajemen akan berusaha mempertahankan keberlanjutan usahanya dengan cara memperbesar laba, dengan asumsi bahwa investor akan tetap tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan dan kegiatan operasional perusahaan dapat tetap

berjalan. Berdasarkan penelitian Rani (2017), Valensia dan Siti (2019) menyatakan bahwa kesulitan keuangan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena perusahaan yang sedang berada dalam kesulitan keuangan akan berupaya meminimalkan beban atau pengeluaran kas perusahaan untuk mengurangi atau mengatasi permasalahan keuangan.

Selain kesulitan keuangan, agresivitas pajak juga di pengaruhi oleh manajemen laba. Scott (2015:445) menyatakan bahwa manajemen laba merupakan pilihan kebijakan akuntansi atau tindakan nyata yang dilakukan oleh manajer demi mencapai tujuan perusahaan. Salah satu motivasi manajer melakukan manajemen laba adalah motivasi pajak. Pada prinsipnya manajemen laba merupakan metode yang dipilih dalam menyajikan informasi laba kepada publik yang sudah disesuaikan dengan kepentingan dari pihak manajer itu sendiri atau menguntungkan perusahaan dengan cara menaikkan ataupun menurunkan laba perusahaan (Arief, et al. 2016). Perilaku manajemen laba selalu diasosiasikan dengan perilaku yang negatif karena manajemen laba menyebabkan tampilan informasi keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini terjadi akibat dari hubungan asimetri antara manajemen, pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan tingkat kepentingan (keinginan) saling berseberangan (Ningsih, 2015).

Berdasarkan teori akuntansi positif yang dikemukakan oleh Watt dan Zimmerman (1986) perusahaan akan melakukan manajemen laba untuk memaksimalkan *utilitasnya* untuk mendapatkan bonus yang tinggi (*Bonus Plan Hypothesis*) dengan cara meningkatkan laba yang dilaporkan. Manajemen perusahaan yang melakukan perjanjian kredit cenderung akan meninggikan labanya untuk menjaga reputasi perusahaan dalam pandangan pihak eksternal (*Debt Covenant Hypothesis*).

Banyaknya kasus-kasus manajemen laba khususnya di Indonesia yang dilakukan oleh manajemen perusahaan diantaranya, PT Garuda Indonesia pada tahun 2018 membukukan laba bersih US\$ 809 ribu berbanding terbalik dari tahun 2017 yang menderita kerugian US\$ 16,58 juta, sementara pada kuartal III 2018 perusahaan masih mengalami rugi sebesar US\$ 114,08, hal ini dikarenakan PT Garuda Indonesia mengakui pendapatan dari PT Mahata Aero Teknologi yang sebenarnya masih bersifat piutang, hal ini menyebabkan beban pajak penghasilan (PPH) dan pajak pertambahan nilai (PPN) yang harus di tanggung Garuda Indonesia menjadi lebih besar (Pratiwi, 2018). PT Tiga Pilar Sejahtera Indofood Tbk (AISA) pada tahun 2017 diduga melakukan penggelembungan pos akuntansi senilai 4 triliun berdasarkan investigasi Ernst dan Young Indonesia (EY) yang terjadi pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap (Sidik, 2019).

Peneliti juga menemukan adanya ketidak konsistenan beberapa hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian Karinda (2018), Nugroho dan Amrie (2017), Lolana dan Susi (2019), Arief, *et al.* (2016), Geraldina (2013) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara manajemen laba dan agresivitas pajak. Perusahaan lebih mungkin menggunakan pilihan akuntansi yang mengurangi laba (*income decreasing*) yang dilaporkan untuk menurunkan pendapatan kena pajak sehingga perusahaan dapat melakukan penghematan atas beban pajak (Putra dan Elly, 2018). Semakin agresif perusahaan melakukan manajemen laba maka dapat dikatakan bahwa tingkat agresivitas pajak perusahaan juga tinggi karena beban pajak semakin kecil. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Henny (2019), Ginting dan Elly (2018) menyatakan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Manajemen Laba tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap penghindaran pajak. Semakin besar *income decreasing* yang dilakukan

perusahaan, maka perusahaan tersebut tidak terindikasi melakukan penghindaran pajak.

Penelitian ini mengintegrasikan penelitian milik Ginting dan Elly (2018), Cita dan Ni Luh (2019) yang menggunakan *effective tax rate* dalam mengukur agresivitas pajak. Menurut Lanis dan Richardson (2012), Ginting dan Elly (2018), Putra dan Elly (2018) menyatakan bahwa ETR merupakan proksi yang paling banyak digunakan pada penelitian terdahulu dan umumnya penelitian terdahulu seperti Suyanto dan Supramono (2012), Lestari dan Selvy (2018), Nurhandono dan Amrie (2017), Novitasari (2017) melakukan pengukuran manajemen laba menggunakan model *discretionary accruals* untuk mengukur adanya tindakan manajemen laba. Model yang sering digunakan adalah model *modified Jones*. Peneliti mengambil sisi lain yaitu mengukur manajemen laba dengan menggunakan manajemen laba riil. Berdasarkan penelitian Geraldina (2013), Silvia (2017), Nugroho dan Amrie (2017), serta Surahman dan Amrie (2017) menemukan bahwa manajer lebih memilih menggunakan manajemen laba riil daripada manajemen laba akrual. Manajemen laba riil lebih menjadi prioritas dalam penggunaannya oleh manajemen dibandingkan manajemen laba akrual karena manajemen laba riil kurang menarik perhatian auditor dan regulator dibandingkan manajemen laba akrual, serta manajemen laba akrual lebih mengandung resiko yang tinggi (Nugroho dan Amrie, 2017). Manajemen laba akrual akan membawa risiko karena pengelolaan laba dengan mengandalkan akrual diskresioner hanya dapat dilakukan pada akhir tahun, sehingga kemampuan manager dalam memanipulasi laba terbatas, akibatnya target laba tidak dapat dicapai (Ningsih, 2015). Manajer dapat mengurangi risiko dengan cara memanipulasi aktivitas-aktivitas riil selama tahun berjalan (Ningsih, 2015).

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan merupakan tindakan penyimpangan yang dapat dicegah dengan pengawasan dan

pengelolaan perusahaan yang baik (*corporate governance*) yang berlandaskan pada peraturan, undang-undang, dan etika usaha (karinda, 2018). *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG, 2012), *corporate governance* merupakan serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan (*stakeholders*). *Corporate governance* merupakan konsep yang didasarkan pada *agency theory* dan diharapkan dapat meminimalkan masalah *agency* antara agen dan prinsipal dengan memberikan keyakinan kepada pihak prinsipal atas kinerja agen (Radifan dan Etna, 2015). *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, serta meyakinkan para investor bahwa manajer tidak akan mencuri atau melakukan penggelapan, serta menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan (Radifan dan Etna, 2015). Berkurangnya konflik *agency*, maka akan terjadi kesinambungan yang baik antara pemilik dengan manajer perusahaan, keselarasan dalam tujuan, dan pada akhirnya menjadikan perusahaan dalam kondisi yang kondusif, sehingga tidak terjadi kondisi kesulitan keuangan (Radifan dan Etna, 2015). *Corporate governance* pada perusahaan dapat mengawasi dan mengendalikan pengelolaan perusahaan agar tidak melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat mencegah atau bahkan mengurangi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Christiana dan Fernando, 2017).

Penelitian ini memasukkan *corporate governance* sebagai variabel pemoderasi yang diduga dapat memperlemah pengaruh kesulitan keuangan dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak. *Corporate governance* pada penelitian ini menggunakan proksi komisaris independen dan komite audit. Komisaris independen merupakan salah satu mekanisme *corporate governance*

yang diperlukan untuk mengurangi masalah *agency* antara pemilik dan manajer.

Komisaris independen bertugas untuk mengawasi manajemen dalam menjalankan kegiatannya agar tidak melanggar hukum dan mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan telah melakukan praktik transparansi, *disclosure*, kemandirian dan keadilan. Berdasarkan penelitian Rani (2017), Octaviani dan Sofie (2018), Putri dan Anis (2017) menyatakan bahwa semakin banyak jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan maka dapat mencegah manajer untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

Komite audit merupakan mekanisme *corporate governance* diharapkan dapat menjadi pengawas terhadap perusahaan dalam menyediakan informasi laporan keuangan yang lebih transparan dan berkualitas. Jumlah anggota komite audit yang tepat dapat membuat anggota komite audit menggunakan pengalaman dan keahlian yang dimiliki untuk melindungi kepentingan pemegang saham, sehingga dapat memperkecil kemungkinan perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak. Berdasarkan penelitian Kusumawati (2015), Novitasari (2017), Putri dan Anis (2017), dengan jumlah komite audit yang sesuai dapat memberikan pengawasan yang lebih intensif, sehingga informasi yang diberikan perusahaan akan lebih akurat dan berkualitas sehingga kemungkinan perusahaan melakukan pengaturan terhadap beban pajaknya cenderung kecil.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Christiana dan Fernando (2017), Karinda (2018) menyatakan bahwa *corporate governance* yang diproksikan oleh dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. *Corporate governance* dapat meminimalisir kesulitan keuangan dan tindakan manajemen laba yang akan dilakukan perusahaan karena adanya pengawasan yang lebih baik dari komisaris independen dan komite audit,

sehingga dapat memperkecil kemungkinan perusahaan melakukan agresivitas pajak.

1.2 Motivasi Penelitian

Motivasi yang mendasari penelitian ini adalah ingin mengkaji isu-isu yang berkaitan dengan agresivitas pajak, kesulitan keuangan, manajemen laba dan *corporate governance*. Pengaruh kesulitan keuangan dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak menarik untuk diteliti lebih lanjut karena hasil penelitian dapat menggambarkan kinerja manajer dalam mengelola perusahaan sehingga dapat menghindari kesalahan pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan. Penelitian ini juga meneliti peran *corporate governance* sebagai variabel moderasi pada pengaruh kesulitan keuangan dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan Keputusan Kepala Bapepam Nomor KERP-643/BL/2012, bahwa komite audit merupakan salah satu tolak ukur tata kelola perusahaan yang baik. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.6/2015, disebutkan (Pasal 4) beberapa kriteria tata kelola perusahaan yang baik adalah dengan adanya dewan komisaris independen dan komite audit. Penerapan *corporate governance* yang baik yang diprosikan oleh dewan komisaris independen dan komite audit dapat menjadi mekanisme pengawasan dan pengendalian yang efektif untuk menghambat tindakan oportunistik manajer dalam mengelola perusahaan agar tidak melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat mencegah atau bahkan mengurangi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Peneliti mengambil sisi lain dari jurnal utama yaitu mengukur manajemen laba menggunakan manajemen laba riil. Berdasarkan penelitian Geraldina (2013), Silvia (2017), Nugroho dan Amrie (2017) manajemen laba riil lebih menjadi

prioritas dalam penggunaannya oleh manajemen karena manajemen laba riil kurang menarik perhatian auditor dan regulator. Manajer dapat mengurangi risiko dengan cara memanipulasi aktivitas-aktivitas riil selama tahun berjalan (Ningsih, 2015). Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2017 – 2018. Pemilihan sektor manufaktur dikarenakan sektor ini merupakan sektor yang dominan dalam perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan memiliki pangsa pasar yang cukup tinggi, sehingga memberikan kontribusi besar pada penerimaan pajak. Perusahaan manufaktur dipilih karena penelitian ini mengukur manajemen laba riil yang salah satu pengukurnya menggunakan biaya produksi.

Penelitian ini dimotivasi oleh hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten mengenai pengaruh kesulitan keuangan dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak. Putri dan Anis (2017); Melia dan Adnan (2017); dan Saputra, *et al* (2017) menemukan pengaruh positif kesulitan keuangan terhadap agresivitas pajak. Cita dan Supadmi (2019) dan Suprpti (2017) menemukan bahwa kesulitan keuangan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Rani (2017); Nugroho dan Firmansyah (2017); Valensia dan Khaerani (2019) menemukan kesulitan keuangan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Ginting dan Suryani (2018); Novitasari (2017); Silvia (2017) menemukan pengaruh positif manajemen laba terhadap agresivitas pajak. Karimah dan Rini (2019); Surahman dan Amrie (2017) menemukan manajemen laba berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Kartikasari (2017) menemukan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Peneliti menambahkan *corporate governance* sebagai variabel moderasi yang diprosikan oleh komisaris independen dan komite audit dapat memperlemah pengaruh kesulitan keuangan dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pitoyo, *et al.*

(2019), Octaviani dan Sofie (2018) menyatakan *corporate governance* berpengaruh positif terhadap kesulitan keuangan dan manajemen laba riil.

Penelitian Christiana dan Fernando (2017), Karinda (2018) menyatakan *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap kesulitan keuangan dan manajemen laba riil. Utami dan Hendri (2015), Gunawan (2017) menemukan bahwa *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini diangkat dengan judul Pengaruh Kesulitan Keuangan dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak dengan *Corporate Governance* sebagai variabel moderasi.

1.3 Rumusan masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang penulis jabarkan, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah kesulitan keuangan berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
2. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
3. Apakah *corporate governance* dengan proksi proporsi komisaris independen dapat memperlemah pengaruh kesulitan keuangan terhadap agresivitas pajak ?
4. Apakah *corporate governance* dengan proksi jumlah komite audit dapat memperlemah pengaruh kesulitan keuangan terhadap agresivitas pajak ?
5. Apakah *corporate governance* dengan proksi proporsi komisaris independen dapat memperlemah pengaruh manajemen laba riil terhadap agresivitas pajak ?
6. Apakah *corporate governance* dengan proksi jumlah komite audit dapat memperlemah pengaruh manajemen laba riil terhadap agresivitas pajak ?

1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh kesulitan keuangan terhadap agresivitas pajak
2. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak
3. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh kesulitan keuangan terhadap agresivitas pajak yang di perlemah oleh *corporate governance* dengan proksi komisaris independen
4. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh kesulitan keuangan terhadap agresivitas pajak yang di perlemah oleh *corporate governance* dengan proksi jumlah komite audit
5. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak yang di perlemah oleh *corporate governance* dengan proksi komisaris independen
6. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak yang di perlemah oleh *corporate governance* dengan proksi jumlah komite audit

1.5 Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut :

1. Kontribusi Teori

Penelitian ini secara teoritis dapat menjelaskan suatu fenomena, meliputi *agency theory*, teori akuntansi positif dan *trade off theory*. *Agency*

theory membahas tentang kontrak antara manajer (*agent*) dan pemilik (*prinsipal*) yang dapat menimbulkan masalah *agency*. Hasil penelitian ini menemukan bukti empiris bahwa *corporate governance* dapat memperkecil kemungkinan perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak. Teori akuntansi positif menjelaskan tentang pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer dan bagaimana manajer akan merespon untuk mengajukan standar akuntansi yang baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajer akan berusaha untuk memilih kebijakan akuntansi yang dapat menguntungkan perusahaan untuk keberlangsungan usahanya. *Trade-off theory* menjelaskan tentang pemilihan pendanaan melalui utang yang dilakukan oleh manajer untuk memperoleh manfaat pajak, sehingga memperkecil penghasilan kena pajak.

2. Kontribusi Praktik

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi praktik nyata dan memperbaiki praktik yang ada agar menjadi lebih baik. Bagi pemangku kepentingan, penelitian ini dapat memberikan gambaran praktis mengenai manajemen laba dan kesulitan keuangan yang dialami perusahaan untuk menghindari tindakan agresivitas pajak. Pemangku kepentingan harus memberikan perhatian lebih terhadap kondisi kesulitan keuangan perusahaan dan tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan agar tidak memberikan respon yang salah terhadap informasi yang di publikasikan oleh manajemen. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya keberadaan komisaris independen dan komite audit untuk mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan.

3. Kontribusi kebijakan

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan agar dapat membuat kebijakan yang dapat memberikan keuntungan kepada semua pihak. Bagi Pihak regulator Direktorat Jendral Pajak dapat menjadi bahan pertimbangan terhadap *Anti-avoidance rules* yang terdapat dalam Pasal 18 UU PPh mengatur jenis-jenis penghindaran pajak yang spesifik dan tertuju pada Wajib Pajak tertentu yang melakukan penghindaran pajak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Akuntansi Positif

Teori Akuntansi Positif merupakan prediksi perusahaan dalam memilih kebijakan akuntansi serta respon perusahaan dalam mengajukan standar akuntansi yang baru (Lestari dan Selvy, 2018). Watts dan Zimmerman (1986) beropini bahwa teori akuntansi positif memiliki 4 (empat) hipotesis, yaitu:

1. Hipotesis Program Bonus (*Bonus Plan Hypothesis*)

Manajer dengan rencana bonus lebih cenderung memilih prosedur akuntansi yang mengalihkan pendapatan yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode saat ini.

2. Hipotesis Perjanjian Utang (*Debt Covenant Hypothesis*)

Semakin besar rasio perjanjian utang, maka semakin besar kemungkinan manajer perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang mengalihkan laba yang dilaporkan dari periode mendatang ke periode saat ini. Oleh karena itu, manajemen akan meningkatkan laba (*income increasing*) untuk menghindar atau setidaknya menunda pelanggaran perjanjian.

3. Hipotesis Biaya Politik (*Political Cost Hypothesis*)

Perusahaan lebih memilih untuk melaksanakan rekayasa penyusutan laba dengan tujuan memperkecil biaya politik yang wajib di tanggung perusahaan. Seluruh biaya yang wajib ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi, subsidi, tarif pajak, tuntutan buruh serta lain sebagainya ialah cakupan dari biaya politik.

4. Hipotesis Ukuran (*The Size Hypothesis*)

Semakin besar perusahaan, semakin besar kemungkinan manajer untuk memilih prosedur akuntansi yang menunda laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke masa depan.

Teori akuntansi positif menganggap bahwa manajer akan memilih kebijakan akuntansi yang baik menurut mereka. Manajer yang aktif melakukan eksplorasi akan memilih untuk merubah keuntungan yang dilaporkan dari periode saat ini guna meningkatkan *present value* aliran bonus, sehingga meskipun laba tinggi tidak akan berdampak pada pajak yang tinggi.

2.2 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Agency theory diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976). *Agency theory* menjelaskan mengenai hubungan kontraktual yang terjadi antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajer perusahaan (*agent*). Menurut Rebecca (2012) *agency theory* adalah hubungan yang timbul akibat adanya kontrak antara pemilik modal dan penerima pekerjaan. Ketika *principal* dan *agent* berkeinginan untuk memaksimalkan kepentingan masing-masing (belum ada keselarasan), maka ada kemungkinan *agent* bertindak tidak untuk kepentingan *principal*. *Principal* berusaha untuk memaksimalkan laba (*risk takers*), sedangkan *agent* sebagai pelaksana aktivitas cenderung tidak menyukai resiko yang terlalu besar (*risk adverse*). *Principal* perlu monitoring kinerja *agent* untuk mengurangi konflik.

Laporan keuangan dan berbagai informasi lainnya yang disampaikan kepada publik adalah salah satu bentuk alat monitoring untuk mengurangi *agency cost* (Hendriyani dan Afrizal, 2015). Pada penyampaian laporan keuangan terdapat asimetri informasi antara *agent* dan *principal*, *agent* memiliki informasi yang lebih banyak dibanding *principal*, karena *agent* hanya mengungkapkan sedikit

mengenai laporan keuangan perusahaan (Sutiyok dan Evi,2014). Aktivitas penghindaran pajak dapat menguntungkan pemegang saham karena keuntungan yang di peroleh akan maksimal. Disisi lain penghindaran dapat merugikan manajemen apabila penghindaran pajak dilakukan secara agresif, karena perusahaan akan menanggung kerugian dimasa depan berupa sanksi pajak.

2.3 Trade-Off Theory

Trade off theory merupakan model struktur modal yang didasarkan pada *trade off* (pertukaran) antara keuntungan dan kerugian penggunaan utang. Teori ini mempunyai asumsi bahwa struktur modal perusahaan merupakan keseimbangan antara keuntungan penggunaan hutang dengan biaya *financial distress* (kesulitan keuangan) dan *agency cost* (biaya *agency*). Utang menimbulkan beban bunga yang dapat menghemat pajak. Beban bunga dapat mengurangi pendapatan sehingga laba sebelum pajak menjadi lebih kecil, dengan demikian pajak juga semakin kecil. Penggunaan utang yang semakin besar akan mengarah pada kesulitan keuangan atau kebangkrutan. Masalah-masalah yang berhubungan dengan kebangkrutan kemungkinan besar akan timbul ketika perusahaan memasukkan lebih banyak utang dalam struktur modalnya. Perusahaan yang bangkrut akan memiliki beban akuntansi dan hukum yang sangat tinggi dan juga mengalami kesulitan untuk mempertahankan para pelanggan, pemasok, dan karyawannya (Wikartika dan Zumrotul, 2018).

Trade-off theory menjelaskan hubungan antara pengorbanan dan manfaat yang timbul akibat penggunaan utang (Mutamimah dan Rita, 2009).

2.4 Kesulitan Keuangan

Kesulitan keuangan merupakan tahap penurunan kondisi keuangan sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi (Plat dan Plat, 2002).

Kesulitan keuangan merupakan suatu kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau sedang krisis yang terjadi ketika perusahaan gagal atau tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya kepada debitor karena mengalami kekurangan dan ketidak cukupan dana untuk menjalankan atau melanjutkan usahanya lagi (Riadi, 2018). Kesulitan keuangan dibagi menjadi

dua, yang pertama adalah kegagalan ekonomi / *economic failure* yang terjadi

karena kegagalan perusahaan dalam menutupi biaya operasi perusahaan.

Kedua adalah kegagalan keuangan / *financial failure* yang disebabkan oleh

technical insolvency atau situasi ketika perusahaan gagal membayar

kewajibannya yang jatuh tempo namun aset yang dimiliki besar dari total hutang

yang dimiliki, dan perusahaan gagal atau tidak mampu lagi memenuhi

kewajibannya kepada debitor karena perusahaan mengalami kekurangan atau

ketidakcukupan dana untuk melanjutkan usahanya sehingga tujuan ekonomi

perusahaan tidak dapat tercapai (Helena dan Muhammad, 2018).

Kesulitan keuangan merupakan gejala awal kebangkrutan akibat

penurunan kondisi keuangan yang dialami oleh suatu perusahaan. Kondisi

keuangan perusahaan yang bermasalah dapat mendorong pemegang saham

melakukan penggantian manajer perusahaan, yang kemudian juga dapat

menurunkan nilai pasar manajer yang bersangkutan di pasar kerja. Ancaman

tersebut dapat mendorong manajer untuk mengatur pola laba akuntansi yang

merupakan salah satu tolak ukur kinerja manajer (Sulastrri dan Yane, 2018).

Perusahaan yang sudah mendekati kesulitan keuangan maka manajemen

perusahaan mengambil keputusan untuk menutup semua kegiatan dalam

perusahaan baik itu kegiatan produksi maupun kegiatan operasional lainnya sebelum terjadinya kebangkrutan atau yang sering disebut dengan likuidasi (Ratna dan Marwati, 2018). Kesulitan keuangan dapat disebabkan oleh ketidakmampuan perusahaan dalam mengantisipasi perkembangan global yang akan mengakibatkan mengecilnya volume usaha sehingga pada akhirnya mengakibatkan kebangkrutan perusahaan. Kesulitan keuangan suatu perusahaan dapat tercermin saat perusahaan mengalami tahap penurunan kondisi keuangan sebelum terjadinya kebangkrutan. Apabila tidak diselesaikan dengan benar, kesulitan kecil tersebut bisa berkembang menjadi kesulitan yang lebih besar dan bisa sampai pada kebangkrutan (Ratna dan Marwati, 2018).

Terdapat beberapa indikator untuk mengetahui tanda-tanda kesulitan keuangan yang dilihat dari pihak internal perusahaan (Ratna dan Marwati, 2018) :

- a. Turunnya volume penjualan karena ketidak mampuan manajemen dalam menerapkan kebijakan dan strategi
- b. Turunnya kemampuan perusahaan dalam mencetak keuntungan
- c. Ketergantungan terhadap utang sangat besar

Sebaliknya, beberapa indikator untuk mengetahui tanda-tanda kesulitan keuangan yang dilihat dari pihak eksternal (Ratna dan Marwati, 2018) :

- a. Dividen yang dibagikan untuk pemegang saham mengalami penurunan selama beberapa periode berturut-turut.
- b. Penurunan laba secara terus-menerus dan perusahaan mengalami kerugian.
- c. Ditutup atau dijualnya satu atau lebih unit usaha.
- d. Pemecatan pegawai secara besar besaran.
- e. Harga dipasar mulai menurun terus menerus.

Dampak kesulitan keuangan tidak hanya memperburuk kondisi keuangan perusahaan, tetapi juga menimbulkan dampak lain seperti buruknya penilaian terhadap kinerja manajemen, banyaknya pegawai/ karyawan penting yang keluar karena kemungkinan akan terjadi penurunan upah/ gaji, pemasok menolak untuk memberikan kredit dan kreditor tidak mau memberikan pinjaman.

Penelitian ini menggunakan model Altman (1968) yang dimodifikasi oleh Graham (1998) untuk mengukur kesulitan keuangan yang memiliki tingkat prediksi di atas 60% dan ukuran ini telah dipakai di berbagai negara dalam rangka memprediksi kesulitan keuangan suatu perusahaan (Nugroho dan Amrie, 2017). Semakin tinggi nilai Z-Score yang dihasilkan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang semakin sehat. Untuk menyesuaikan pengukuran dengan variabel maka nilai Z-Score yang dihasilkan dikalikan -1 , sehingga semakin besar nilainya mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang semakin buruk.

2.5 Manajemen Laba

Manajemen laba merupakan pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer dari standar akuntansi yang ada dan secara langsung dapat memaksimalkan utilitas mereka atau nilai pasar perusahaan (Scott, 2015:445). Menurut Scott (2015:445) manajemen laba sering dilakukan dengan memanfaatkan celah dari standar akuntansi, sehingga informasi dalam laporan keuangan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Manajemen laba sengaja dilakukan oleh manajemen untuk mengelabui *stakeholders* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan.

Manajemen laba merupakan tindakan manipulasi laba yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan karena manajemen merupakan pihak yang memiliki

kemampuan untuk merekayasa angka dalam penyusunan laporan keuangan (Napitupulu, 2012).

Manajemen laba dapat terlihat apabila manajer memilih tindakan dengan konsekuensi arus kas dengan tujuan mengubah laba. Motivasi untuk memenuhi target laba dapat membuat manajer atau perusahaan mengabaikan praktik bisnis yang baik. Namun, rekayasa laba juga tidak selalu dikaitkan dengan upaya memanipulasi data atau informasi akuntansi, tetapi cenderung dikaitkan dengan pemilihan metode akuntansi yang diperkenankan menurut standar akuntansi.

Secara sekilas tampak bahwa rekayasa laba berhubungan erat dengan tingkat perolehan laba (*earnings*) atau kinerja perusahaan. Hal tersebut karena tingkat laba yang diperoleh dikaitkan dengan kinerja manajemen. Scott (2015:447) menyatakan bahwa terdapat beberapa pola dalam manajemen laba, yaitu :

1. Tindakan Kepalang Basah (*Big Bath*)

Strategi *Big Bath* atau "Tindakan Kepalang Basah" dilakukan melalui penghapusan (*write-off*) sebanyak mungkin pada satu periode. Periode yang dipilih biasanya periode dengan kinerja yang buruk atau peristiwa saat terjadi satu kejadian yang tidak biasa seperti perubahan manajemen, merger, atau restrukturisasi, serta mengakui biaya-biaya pada periode yang akan datang dan kerugian periode berjalan.

2. Minimalisasi Pendapatan (*Income Minimization*)

Manajemen laba dilakukan pada saat perusahaan memperoleh profitabilitas yang tinggi agar tidak mendapat perhatian secara politis.

Kebijakan yang diambil berupa minimalisasi pendapatan termasuk penghapusan cepat aset modal dan tidak berwujud, pembebanan pengeluaran iklan, riset dan pengembangan, dan lain sebagainya.

3. Maksimalisasi Pendapatan (*Incom Maximization*)

Manajer dapat terlibat dalam pola memaksimalkan laba bersih yang dilaporkan untuk tujuan bonus, asalkan laba yang dilaporkan masih wajar dan tidak melebihi batas. Tindakan ini juga dapat dilakukan untuk menghindari pelanggaran atas kontrak hutang jangka panjang (*debt covenant*).

4. Perataan Laba (*Income Smoothing*)

Manajer melaporkan informasi laba yang telah di manipulasi untuk meminimalkan fluktuasi laba yang dilaporkan, sehingga kinerja perusahaan terlihat stabil juga tidak beresiko tinggi.

2.5.1 Manajemen Laba Riil

Teknik manajemen laba dengan manipulasi aktivitas riil (*manajemen laba riil*) diperkenalkan oleh Roychowdhury (2006). Menurut Roychowdhury (2006), manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil merupakan suatu tindakan manajemen yang menyimpang praktik bisnis perusahaan secara normal dengan tujuan utama untuk mencapai target laba yang diharapkan, akan tetapi target laba terpenuhi tidak selalu memberikan kontribusi terhadap nilai perusahaan meskipun target telah tercapai. Dalam mendeteksi manajemen laba riil menurut Roychowdhury (2006); Cohen dan Zarowin (2010) dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

a. Manipulasi Penjualan

Manipulasi penjualan merupakan usaha untuk meningkatkan penjualan secara temporer dalam periode tertentu dengan menawarkan diskon harga produk secara berlebihan atau memberikan persyaratan kredit yang lebih lunak. Strategi ini dapat meningkatkan volume penjualan dan laba periode saat ini dengan mengasumsikan marginnya positif. Namun,

pemberian diskon harga dan syarat kredit yang lebih lunak akan menurunkan aliran kas periode saat ini.

b. Penurunan beban-beban diskresionari (*discretionary expenditures*)

Perusahaan dapat menurunkan beban diskresionari seperti beban penelitian dan pengembangan, iklan, dan penjualan, administrasi, dan umum terutama dalam periode di mana pengeluaran tersebut tidak secara langsung berdampak pada perubahan laba perusahaan. Strategi ini dapat meningkatkan laba dan arus kas periode saat ini namun dengan resiko menurunkan arus kas periode mendatang.

c. Produksi yang berlebihan (*overproduction*)

Untuk meningkatkan laba, manajer perusahaan dapat meningkatkan produksi dengan asumsi bahwa tingkat produksi yang lebih tinggi akan menyebabkan biaya tetap per unit produk lebih rendah. Strategi ini dapat menurunkan kos barang terjual dan meningkatkan laba operasi.

Ketiga cara manipulasi aktivitas riil di atas umumnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dengan kinerja yang buruk sehingga tidak banyak memiliki aktivitas akrual untuk dimanipulasi, sehingga manajemen akan berusaha manipulasi aktivitas riil untuk mencapai laba sedikit di atas nol. Perusahaan yang diduga melakukan manipulasi aktivitas riil akan mempunyai *Abnormal Cash Flow Operations* dan *Abnormal Production Cost* yang lebih besar dibandingkan perusahaan-perusahaan lain serta *Abnormal Discretionary Expenses* yang lebih kecil.

Hasil survey Graham, Harvey dan Rajgopal (2005) menemukan bukti kuat bahwa 78% dari 401 manajer sebagai responden jauh lebih bersedia untuk terlibat dalam manajemen laba riil daripada manajemen akrual untuk mencapai target laba. Beberapa penelitian manajemen laba terkini menyatakan pentingnya memahami bagaimana perusahaan melakukan

manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil selain manajemen laba berbasis akrual Roychowdhury (2006), Gunny (2005), Cohen *et al.* (2008), Cohen dan Zarowin (2010). Berdasarkan Roychowdhury (2006), Fibrininta dan Sylvia (2014) pengukuran manajemen laba riil menggunakan:

1. *Abnormal Cash Flow Operations* (CFO / Arus Kas Operasi Abnormal)

CFO abnormal adalah manipulasi laba yang dilakukan perusahaan melalui aliran operasi kas yang akan memiliki aliran kas lebih rendah daripada level normalnya. Estimasi nilai residu dari CFO merupakan nilai abnormal CFO.

2. *Abnormal Production Cost* (PROD) / Biaya Kegiatan Produksi Abnormal

Abnormal production cost adalah Manajemen laba riil yang dilakukan melalui manipulasi biaya produksi, sehingga perusahaan akan memiliki biaya produksi lebih tinggi daripada level normalnya. Estimasi nilai residu dari biaya produksi merupakan nilai abnormal PROD.

3. *Abnormal Discretionary Expenses* (DISC) / Biaya Diskresionari Abnormal

Abnormal discretionary expenses adalah manipulasi laba yang dilakukan melalui biaya penelitian dan pengembangan, biaya iklan, biaya penjualan, administrasi, dan umum. Estimasi nilai residu dari biaya diskresioner merupakan nilai abnormal DISC.

Aktivitas riil dianggap dapat menangkap pengaruh lebih baik daripada hanya mengandalkan aktivitas akrual, indikasi keterlibatan manajemen perusahaan pendapatan dengan manipulasi aktivitas riil dapat ditunjukkan oleh nilai *Abnormal Production Cost* (PROD) (Ningsih, 2015). Roychowdhury (2006) memberikan bukti empiris bahwa perusahaan melakukan manajemen laba riil untuk menghindari melaporkan kerugian.

2.6 Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan tindakan untuk menurunkan laba sehingga pajak yang dibayarkan rendah, baik dengan cara yang sesuai atau tidak dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Frank et al, 2009). Terdapat dua jenis agresivitas pajak yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax avoidance* adalah usaha wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang perpajakan, sedangkan *tax evasion* adalah tindakan meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang perpajakan atau sering disebut penggelapan pajak (Resmi, 2014).

Menurut Novitasari (2017), agresivitas pajak merupakan suatu tindakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak baik secara legal maupun illegal guna mengecilkan beban pajaknya. Bagi perusahaan dengan beban pajak yang tinggi akan mengurangi keuntungan yang diperoleh perusahaan. Cara untuk mengukur perusahaan yang melakukan agresivitas pajak yaitu dengan menggunakan proksi *Effective Tax Rates* (ETR). ETR bertujuan untuk melihat beban pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan. Jika nilai $ETR = 0$ maka perusahaan tersebut tidak memiliki pajak kini yang berarti perusahaan mengalami kerugian sehingga pajak kini perusahaan tidak ada dan perusahaan pada periode tersebut tidak membayar pajak. Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang "Pajak Penghasilan" telah direvisi melalui penerbitan Undang-Undang No.36 tahun 2008 mengatur perubahan tarif pajak penghasilan badan, dari sebelumnya tarif progresif menjadi tarif tunggal sebesar 25% untuk tahun 2012 dan seterusnya (Onlinepajak, April 2020).

2.7 Corporate Governance

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD, 2015) *corporate governance* merupakan seperangkat tata hubungan

diantara manajemen perseroan, direksi, komisaris, pemegang saham, dan para pemangku kepentingan lainnya. Mekanisme *corporate governance* terdapat beberapa proksi, diantaranya adalah komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institutional, dan komite audit. Namun, pada penelitian ini penulis hanya menggunakan dua proksi yaitu komisaris independen dan komite audit.

2.7.1 Komisaris Independen

Berdasarkan Peraturan Nomor IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK KEP-643/BL/2012, bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Keberadaan komisaris independen di Indonesia telah diatur dalam Bursa Efek Indonesia melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus mempunyai Komisaris Independen yang proporsinya sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Adanya pengawasan yang ketat dari komisaris independen maka akan mengurangi kesempatan manajer untuk berlaku agresif terhadap pajak perusahaan.

Berdasarkan Keputusan Direksi BEI nomor: KEP-399/BEJ/07-2001, komisaris independen bertanggungjawab untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, dan memberikan nasehat kepada dewan direksi (Helena dan Muhammad, 2018). Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi keuntungan perusahaan.

2.7.2 Komite Audit

Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK, komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengarahkan perusahaan agar taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk patuh terhadap perpajakan. Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-643/BL/2012, tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, bahwa Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite Audit harus mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam tiga bulan. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota. Keputusan rapat komite audit diambil berdasarkan musyawarah anggota komite audit yang mengikuti rapat untuk mencapai mufakat. Setiap rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang hadir dan disampaikan kepada dewan komisaris. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Adanya pengawasan dari komite audit yang intensif, maka informasi yang diberikan perusahaan akan lebih akurat dan berkualitas sehingga, kemungkinan perusahaan melakukan pengaturan terhadap beban pajaknya cenderung berkurang. Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal. Komite audit terdiri dari pihak yang berasal dari luar perusahaan atau yang bisa disebut dengan independen dan pihak yang berasal dari dalam perusahaan atau berasal dari komisaris independen.

2.8 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menganalisis hubungan antara kesulitan keuangan, manajemen laba, agresivitas pajak, dan *corporate governance*. Penelitian yang dilakukan Cita dan Supadmi (2019) yang menguji pengaruh kesulitan keuangan dan *good corporate governance* pada praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer goods* yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2013 sampai tahun 2017. Hasil dari penelitian tersebut menemukan bahwa kesulitan keuangan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, kepemilikan institusional berpengaruh positif pada *tax avoidance*, komisaris independen berpengaruh positif pada *tax avoidance*, dan komite audit berpengaruh positif pada *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Ginting dan Elly (2018) menguji pengaruh manajemen laba dan *corporate governance* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan telekomunikasi yang tercatat di bursa efek indonesia periode tahun 2012 sampai dengan 2016. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa manajemen laba dan *corporate governance* yang diprosikan oleh dewan komisaris independen dan komite audit secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan. Manajemen laba merupakan cara perusahaan mengintervensi laporan keuangan yang bertujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan, manajemen cenderung melakukan praktik manajemen laba dengan cara menurunkan laba (*income decreasing*).

Penelitian yang dilakukan Puri dan Gayatri (2018) menguji *good corporate governance* memoderasi pengaruh kesulitan keuangan terhadap manajemen laba pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2012 sampai tahun 2016. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesulitan keuangan berpengaruh terhadap manajemen laba dan *good corporate*

governance dapat memperlemah pengaruh kesulitan keuangan terhadap manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Anis (2017) menguji pengaruh kesulitan keuangan dan *good corporate governance* terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesulitan keuangan dan juga ukuran dewan direksi memiliki pengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Sementara variabel kepemilikan saham manajerial, komisaris independen, dan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap praktik *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Christiana dan Fernando (2017) menguji peran *corporate governance* sebagai pemoderasi atas pengaruh agresivitas pajak pelaporan keuangan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan agresivitas pelaporan keuangan akan melakukan agresivitas pajak baik dengan memanfaatkan celah pajak atau menggunakan cara yang tidak diperbolehkan. *Corporate governance* yang diprosikan komisaris independen menunjukkan bahwa semakin besar proporsi dewan komisaris maka akan semakin baik pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan sehingga dapat mencegah atau bahkan mengurangi tindakan agresivitas pajak. Adanya komite audit dapat membantu manajemen dalam menentukan strategi perpajakan yang tepat karena komite audit memberikan pandangan mengenai masalah berkaitan dengan laporan keuangan dan pengendalian internal.

Penelitian yang dilakukan oleh Arief *et al.* (2016) menguji pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak pada perusahaan batubara yang terdaftar di bursa efek indonesia periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.

Penelitian tersebut menggunakan proksi *Effective Tax Rates* (ETR) untuk menilai adanya indikator agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Pengukuran manajemen laba menggunakan *discretionary accruals* yang dihitung dengan cara menyisihkan *total accruals* dan *non discretionary accruals*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa rata-rata (mean) dari manajemen laba yang diukur menggunakan *discretionary accruals* (DA) lebih rendah dari standar deviasi yang menunjukkan bahwa data yang dipakai bervariasi dan sampel yang di gunakan untuk DA belum dapat mewakili keseluruhan populasi. Agresivitas pajak yang diukur menggunakan *effective tax rates* (ETR) memiliki mean yang lebih rendah dari standar deviasi, dan analisis regresi data panel menunjukkan bahwa secara parsial manajemen laba memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Geraldina (2013) menguji preferensi manajemen laba akrual atau manajemen laba riil dalam aktivitas *tax shelter*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan cenderung menggunakan manajemen laba riil melalui diskresi arus kas operasi dan biaya produksi dalam menaikkan kemungkinan perusahaan terlibat dalam kegiatan *tax shelter*. Peneliti juga menemukan bahwa penggunaan manajemen laba akrual atau manajemen laba riil dalam aktivitas *tax shelter* dapat saling bersubstitusi.

BAB III

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Perusahaan didirikan memiliki tujuan untuk memaksimalkan utilitas untuk keberlanjutan usaha di masa yang akan datang. Keberlangsungan usaha dapat dilihat dari keuntungan yang didapatkan perusahaan. Namun, semakin besar keuntungan perusahaan, maka pajak yang akan dibayarkan juga semakin besar.

Hal ini menyebabkan perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan perencanaan pajak dengan cara memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan atau yang biasa disebut *grey area* sehingga sulit untuk dideteksi sebagai pelanggaran, namun berpotensi merugikan negara. Semakin banyak celah yang digunakan oleh perusahaan maka perusahaan dapat dianggap telah melakukan tindakan agresif terhadap pajak. *Agency theory* menjelaskan bahwa hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan dan manajer dapat menimbulkan konflik *agency* yang diakibatkan oleh pemisahan fungsi dan adanya perbedaan tujuan antara pemilik dan manajer perusahaan. Asimetri informasi juga memberikan peluang lebih kepada manajer untuk bertindak secara oportunistik agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan perusahaan.

Kesulitan keuangan merupakan tahap penurunan kondisi keuangan sehingga perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada debitor, penurunan jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham, penurunan laba secara terus-menerus dan perusahaan mengalami kerugian, ditutup atau dijualnya salah satu unit usaha, pemecatan pegawai secara besar-besaran serta perusahaan melakukan merger (Ratna *et al.* 2018).

Ketika perusahaan dalam kondisi kesulitan keuangan maka manajemen akan mengambil resiko yang dapat mengembalikan keseimbangan perusahaan melalui penghindaran pajak (Richardson *et al*, 2015). Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan menunjukkan peningkatan pada biaya modal, rating kredit yang melemah, dan meningkatnya kecenderungan manajer untuk mengambil risiko lebih dengan melakukan agresivitas pajak (Nugroho dan Amrie, 2017). Manajer akan memanfaatkan cara yang ada namun aman agar perusahaan tetap berdiri sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati sebelumnya.

Manajemen laba merupakan perilaku oportunistik yang dilakukan oleh manajemen dengan tujuan untuk memaksimalkan utilitasnya. Berdasarkan teori akuntansi positif perusahaan akan melakukan manajemen laba untuk memaksimalkan utilitasnya dan mendapatkan bonus yang tinggi (*Bonus Plan Hypothesis*) dengan cara meningkatkan laba yang dilaporkan. Laba yang tinggi dapat memungkinkan perusahaan mengeluarkan beban pajak yang tinggi, sehingga manajemen lebih mungkin menggunakan pilihan akuntansi yang mengurangi laba (*income decreasing*) yang dilaporkan untuk menurunkan pendapatan kena pajak sehingga perusahaan dapat melakukan penghematan atas beban pajak. Semakin agresif perusahaan melakukan manajemen laba maka dapat dikatakan bahwa tingkat agresivitas pajak perusahaan juga tinggi karena beban pajak semakin kecil. Penelitian ini menggunakan manajemen laba riil dalam mengukur manajemen laba. Manager lebih memilih menggunakan manajemen laba riil daripada manajemen laba akrual, karena manajemen laba riil kurang menarik perhatian auditor dan regulator dibandingkan manajemen laba akrual. Manajemen laba akrual lebih mengandung resiko yang tinggi (Nugroho dan Amrie, 2017). Manajemen laba akrual akan membawa risiko karena pengelolaan laba dengan mengandalkan akrual diskresioner hanya dapat

dilakukan pada akhir tahun, sehingga kemampuan manager dalam memanipulasi laba terbatas, akibatnya target laba tidak dapat dicapai (Ningsih, 2015). Manajer dapat mengurangi risiko dengan cara memanipulasi aktivitas-aktivitas riil selama tahun berjalan (Ningsih, 2015).

Pengindaran pajak atau tindakan agresivitas pajak dapat dicegah dengan pengawasan dan pengelolaan perusahaan yang baik (*corporate governance*).

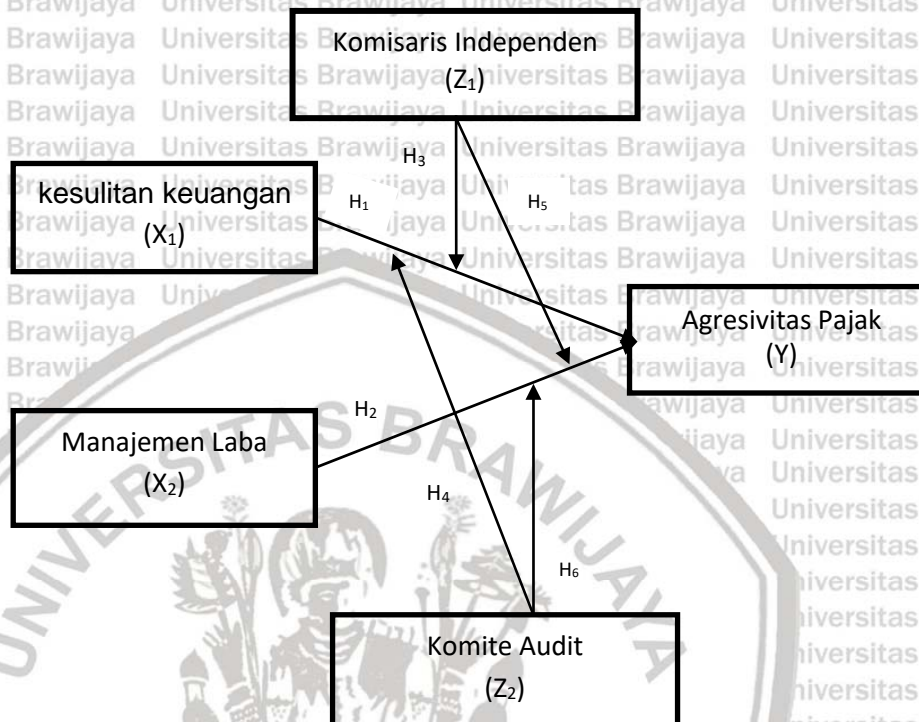
Peneliti memasukkan *corporate governance* sebagai variabel moderasi yang diduga dapat memperlemah pengaruh kesulitan keuangan dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak. Peneliti menggunakan proksi dewan komisaris independen dan komite audit sebagai proksi *corporate governance*. Menurut Lanis dan Richardson (2011) keberadaan komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen dan meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap aturan perpajakan. Komisaris independen berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik-praktik transparansi, *disclosure*, kemandirian dan praktik keadilan. Keberadaan komisaris independen dapat memperkecil kemungkinan perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak. Keberadaan komite audit dapat menjadi pengawas bagi perusahaan dalam menyajikan informasi keuangan kepada publik. Adanya jumlah komite audit yang cukup di dalam perusahaan maka diharapkan mampu untuk mengurangi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan.

Penelitian ini menggunakan agresivitas pajak karena peneliti tertarik untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memaksimalkan utilitasnya dengan cara memperkecil pajak perusahaan secara agresif.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat hubungan antara kesulitan keuangan, manajemen laba, agresivitas pajak, dan *corporate*

governance. Maka dalam penelitian ini peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut.

Gambar 3.1
Model Kerangka Konseptual



3.2 Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pengujian hipotesis, sehingga perlu untuk merumuskan hipotesis penelitian yang akan diuji dan dianalisis.

Hipotesisi yang dibangun berkaitan dengan pengaruh kesulitan keuangan terhadap agresivitas pajak, pengaruh manajemen laba riil terhadap agresivitas pajak, peran moderasi *corporate governance* pada pengaruh kesulitan keuangan, dan peran *corporate governance* terhadap manajemen laba riil. Pengembangan hipotesis penelitian ini dijelaskan pada bagian-bagian berikut.

3.2.1 Kesulitan Keuangan dan Agresivitas Pajak

Kesulitan keuangan merupakan tahap penurunan kondisi keuangan perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan. Kesulitan keuangan

menyebabkan kegiatan operasional perusahaan tidak berjalan lancar, oleh sebab itu manajer akan berusaha mencari cara agar kegiatan operasional tetap berjalan yaitu dengan pendanaan melalui utang. Berdasarkan *trade off theory* yang menyatakan bahwa struktur modal perusahaan merupakan keseimbangan antara keuntungan dan kerugian penggunaan utang. Utang merupakan salah satu sumber pendanaan eksternal yang dapat membiayai aktivitas perusahaan. Salah satu alasan pemilihan utang sebagai sumber pendanaan adalah manfaat pajak.

Pendanaan melalui utang akan memunculkan beban bunga, sehingga dapat mengurangi penghasilan kena pajak akan tetapi semakin besar utang maka beban yang harus ditanggung perusahaan juga semakin tinggi.

Pengaruh kesulitan keuangan terhadap agresivitas pajak masih menjadi perdebatan dikalangan peneliti. Putri dan Anis (2017) menemukan bahwa kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Jika resiko kebangkrutan sudah cukup tinggi, maka perusahaan akan secara agresif melakukan praktik penghindaran pajak dan mengabaikan risiko audit yang dilakukan oleh otoritas pajak. Saputra *et al.* (2017) menemukan bahwa kesulitan keuangan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Intensifikasi tekanan keuangan di suatu perusahaan akan menyebabkan peningkatan penghindaran pajak perusahaan. Richardson *et al.* (2015) mempelajari dampak kesulitan keuangan pada penghindaran pajak perusahaan yang mencakup krisis keuangan global di Australia, menyimpulkan bahwa kesulitan keuangan memiliki hubungan positif dengan penghindaran pajak, selain itu hubungan antara kesulitan keuangan dan penghindaran pajak telah meningkat karena krisis keuangan global. Warsini, *et al.* (2018) menemukan bahwa kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti memprediksi terjadinya pengaruh positif antara perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dengan agresivitas pajak. Demikian hipotesis pertama dari penelitian ini adalah:

H₁: Kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

3.2.2 Manajemen Laba dan Agresivitas Pajak

Berdasarkan teori akuntansi positif yang dikemukakan oleh Watt dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa manajemen akan berusaha untuk memaksimalkan utilitasnya untuk mendapatkan bonus yang tinggi (*bonus plan hypothesis*) dengan cara meningkatkan laba yang dilaporkan. Manajemen laba merupakan metode yang dipilih dalam penyajian informasi laba kepada publik yang telah disesuaikan dengan kepentingan dari pihak manajer itu sendiri agar dapat menguntungkan perusahaan dengan cara menaikkan ataupun menurunkan laba perusahaan.

Manajemen laba sendiri terdiri atas dua jenis yaitu manajemen laba akrual dan manajemen laba riil. Penelitian Graham *et al.*, (2005) memberikan kesimpulan bahwa para manajer memiliki kecenderungan untuk melakukan manajemen laba riil daripada manajemen laba akrual. Manajemen laba riil lebih menjadi prioritas dalam penggunaannya oleh manajemen dibandingkan manajemen laba akrual karena manajemen laba riil kurang menarik perhatian auditor dan regulator dibandingkan manajemen laba berbasis akrual sebagaimana penelitian Ratmono (2010) yang berhasil membuktikan bahwa manipulasi aktivitas riil perusahaan-perusahaan di Indonesia, yang merupakan keputusan operasional tentang produksi, penentuan harga, dan pemotongan beban-beban diskresionari, tidak mendapat perhatian dari auditor. Manajemen laba akrual akan membawa risiko karena pengelolaan laba dengan mengandalkan akrual diskresioner hanya dapat dilakukan pada akhir tahun,

sehingga kemampuan manager dalam memanipulasi laba terbatas, akibatnya target laba tidak dapat dicapai (Ningsih, 2015). Manager dapat mengurangi risiko dengan cara memanipulasi aktivitas-aktivitas riil selama tahun berjalan (Ningsih, 2015).

Terdapat beberapa penelitian tentang manajemen laba dan agresivitas pajak, antara lain oleh Geraldina (2013), Nugroho dan Amrie (2017) menemukan bahwa manajemen laba riil melalui deskresi arus kas operasi dan biaya produksi menaikkan kemungkinan perusahaan terlibat dalam kegiatan agresivitas pajak.

Arief et al (2016), Putra dan Elly (2018), Novitasari (2017) menemukan bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian Ginting dan Elly (2018), serta Henny (2019) menemukan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan pertimbangan teori dan penelitian terdahulu, peneliti memprediksi terjadinya pengaruh positif antara perusahaan yang melakukan manajemen laba dengan agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diajukan hipotesis :

H_2 : manajemen laba riil berpengaruh positif terhadap tindakan agresivitas pajak

3.2.3 Peran Moderasi Corporate Governance Pada Pengaruh Kesulitan Keuangan Terhadap Agresivitas Pajak

Perusahaan yang sedang mengalami kondisi kesulitan keuangan memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak guna mengurangi arus kas keluar dan beban perusahaan (Rani, 2017). Edward et al (2013) menjelaskan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dihadapkan pada kondisi meningkatnya biaya modal, pengurangan akses terhadap sumber daya eksternal (khususnya utang), penurunan rating kredit dan secara umum hal tersebut mendorong manajemen untuk mengambil risiko lebih terkait agresivitas

pajak. Richardson *et al.* (2015), Putri dan Anis (2017), Meilia dan Adnan (2017), dan Saputra *et al.* (2017) berhasil membuktikan adanya pengaruh positif antara kesulitan keuangan terhadap *tax avoidance* yang berarti perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan yang cukup tinggi akan melakukan tindakan agresif terhadap pajak agar citra perusahaan tetap terlihat baik. Agar memperkecil tindakan agresivitas pajak penerapan *corporate governance* perlu dilakukan.

Penelitian ini menggunakan ukuran dewan komisaris independen dan jumlah komite audit sebagai proksi dari *corporate governance*. Komisaris independen memiliki tanggung jawab untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan cara memonitoring kegiatan operasional perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk mengawasi perusahaan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya (KNKG, 2006). Adanya komisaris independen maka dalam setiap perumusan strategi perusahaan yang dilakukan oleh dewan komisaris beserta manajemen perusahaan dan para *stakeholder* akan memberikan jaminan hasil yang efektif dan efisien termasuk pada kebijakan besaran tarif pajak perusahaan (Hanum dan Zulaikha, 2013). Adanya komisaris independen maka dapat menghindari terjadinya asimetri informasi antara *agent* dan *principal* yang dapat menimbulkan kondisi kesulitan keuangan perusahaan (Hanifah dan Agus, 2013). Semakin besar proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan maka pengawasan perusahaan juga akan semakin besar, maka manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan lebih transparan dalam menjalankan usahanya sehingga meminimalkan terjadinya agresivitas pajak (Rosidy dan Rahadi, 2019).

Keberadaan komite audit memiliki peranan yang penting untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan (Rani, 2017). Komite audit merupakan mekanisme *corporate governance* yang diasumsikan dapat mengurangi masalah *agency* yang apabila masalah *agency* tersebut dibiarkan maka dapat menimbulkan kesulitan keuangan pada perusahaan (Hanifah dan Agus, 2013). Jumlah anggota komite audit yang tepat dapat membuat anggota komite audit menggunakan pengalaman dan keahlian yang dimiliki untuk melindungi kepentingan pemegang saham, sehingga dapat memperkecil kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan (Radifan dan Etna, 2015). Berdasarkan hal tersebut, komite audit dengan wewenang yang dimilikinya akan dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan. Adanya komite audit dalam perusahaan dapat meminimalisir terjadinya praktik *tax avoidance* (Diantari dan Ulupui, 2016).

Semakin tinggi persentase komisaris independen dan komite audit maka pengawasan terhadap manajemen akan semakin ketat sehingga pihak manajemen akan bertindak lebih hati-hati termasuk dalam keputusan meminimalisir pajak pada laporan keuangan perusahaan (Rani, 2017). Berdasarkan penelitian Rani (2017), Octaviani dan Sofie (2018), Putri dan Anis (2017) menyatakan bahwa semakin banyak jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan maka dapat mencegah manajer untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Berdasarkan penelitian Rani (2017), Novitasari (2017), Putri dan Anis (2017) dengan adanya pengawasan dari komite audit yang intensif, maka informasi yang diberikan perusahaan akan lebih akurat dan berkualitas sehingga kemungkinan perusahaan melakukan pengaturan terhadap beban pajaknya cenderung kecil. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen dan

komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan pertimbangan teori dan penelitian terdahulu, dapat diajukan hipotesis berikut:

H₃: corporate governance (proporsi komisaris independen) memperlemah pengaruh kesulitan keuangan terhadap agresivitas pajak

H₄: corporate governance (jumlah komite audit) memperlemah pengaruh kesulitan keuangan terhadap agresivitas pajak

3.2.4 Peran Moderasi Corporate Governance Pada Pengaruh Manajemen

Laba Riil Terhadap Agresivitas Pajak

Manajemen laba yang dilakukan manajemen meningkatkan kemungkinan suatu perusahaan untuk melakukan tindakan agresif terhadap pajak. Manajemen laba merupakan usaha manajer untuk melakukan manipulasi laporan keuangan dengan sengaja dalam batasan yang dibolehkan oleh prinsip-prinsip akuntansi dengan tujuan untuk memberikan informasi yang telah disesuaikan kepada para pengguna laporan keuangan. Semakin agresif perusahaan melakukan manajemen laba maka dapat dikatakan tingkat agresivitas pajak perusahaan juga tinggi karena beban pajak semakin kecil. Penelitian yang dilakukan oleh Geraldina (2013), Nugroho dan Amrie (2017) menemukan bahwa manajemen laba riil melalui deskresi arus kas operasi dan biaya produksi menaikkan kemungkinan perusahaan terlibat dalam kegiatan agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ginting dan Elly (2018), serta Henny (2019) menemukan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, untuk menyelesaikan masalah *agency* ini dibutuhkan suatu tata kelola perusahaan yang baik, maka perusahaan harus menciptakan mekanisme *corporate governance*. Adapun mekanisme *corporate governance* tersebut dapat tercapai melalui komisaris independen dan komite audit. Menurut FCGI, Komisaris Independen berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan

memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik-praktik transparansi, *disclosure*, kemandirian, akuntabilitas, dan praktik keadilan menurut ketentuan yang berlaku. Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat lebih efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pihak manajemen, sehingga diharapkan dapat mengurangi praktik manajemen laba (Murhadi, 2009). Komisaris independen melakukan monitoring terhadap kinerja direksi yang dipimpin oleh direktur dan bertindak secara independen tanpa adanya pengaruh dari pihak-pihak yang ada dalam perusahaan (Radifan dan Etna, 2015). Semakin besar proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan maka pengawasan perusahaan juga akan semakin besar, maka manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan lebih transparan dalam menjalankan usahanya sehingga memperkecil kemungkinan tindakan agresivitas pajak (Rosidy dan Rahadi, 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Supramono (2012) menunjukkan bahwa variabel Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tiaras dan Henryanto (2015) menunjukkan hasil bahwa variabel Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Faktor lain yang diprediksi dapat mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan adalah pengawasan dari Komite Audit. Adanya pengawasan dari komite audit, maka informasi yang diberikan perusahaan akan lebih akurat dan berkualitas, sehingga kemungkinan perusahaan melakukan pengaturan terhadap beban pajaknya cenderung berkurang. Perusahaan yang memiliki komite audit akan menghambat perilaku manajemen laba dan diharapkan dapat melihat praktik-praktik yang bertentangan dengan asas keterbukaan informasi (Murhadi, 2009). Penelitian mengenai komite audit terhadap agresivitas pajak telah beberapa kali dilakukan oleh peneliti terdahulu. Ariyani (2014) menguji bahwa frekuensi rapat komite

audit tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Seprini (2016), Intensitas Pertemuan komite audit berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif perusahaan.

Manajemen laba diindikasi memberi pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak, berbeda dengan pengaruh *Corporate Governance* yang beberapa tahun terakhir digencarkan untuk mengurangi adanya manajemen laba atau praktik penghindaran pajak. *Corporate Governance* diharapkan memperkecil konflik *agency* yang umumnya terjadi antara pemegang saham dan manajemen sehingga data keuangan yang dihasilkan dan dilaporkan oleh manajemen akan lebih riil atau sesuai aslinya.

Berdasarkan penelitian Hapsoro dan Adrianus (2016), Wardani dan Wening (2017), Kusumawati (2015), Rani (2017), Octaviani dan Sofie (2018), Putri dan Anis (2017) menyatakan bahwa semakin banyak jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan maka dapat mencegah manajer untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Berdasarkan penelitian Kusumawati (2015), Rani (2017), Novitasari (2017), Putri dan Anis (2017) dengan jumlah komite audit yang sesuai dapat memberikan pengawasan yang lebih intensif, sehingga informasi yang diberikan perusahaan akan lebih akurat dan berkualitas dan kemungkinan perusahaan melakukan pengaturan terhadap beban pajaknya cenderung kecil.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diajukan hipotesis berikut.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka hipotesis pada penelitian ini dinyatakan sebagai berikut :

H_5 : *corporate governance* (proporsi komisaris independen) memperlemah pengaruh manajemen laba riil terhadap agresivitas pajak

H_6 : *corporate governance* (jumlah komite audit) memperlemah pengaruh manajemen laba riil terhadap agresivitas pajak

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menguji pengaruh kesulitan keuangan dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif.

Unit analisis dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang telah *go public* pada Bursa Efek Indonesia. Jangka waktu penelitian ini dua tahun yaitu selama tahun 2017 dan 2018. Jenis penelitian ini adalah pengujian hipotesis (*hypothesis testing*), karena dalam penelitian ini sudah ditentukan sejak awal riset dan bermaksud untuk memprediksi tentang suatu fenomena (Hartono, 2017:55).

4.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) periode 2017 sampai dengan 2018. Jumlah seluruh perusahaan *go public* yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia sampai dengan desember 2018 sebanyak 288 perusahaan.

Pemilihan perusahaan manufaktur sebagai sampel penelitian ini dikarenakan perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan memiliki pangsa pasar yang cukup tinggi, sehingga memberikan kontribusi besar pada penerimaan pajak. Manajemen laba riil terkait dengan perhitungan biaya produksi. Manipulasi produksi sebagai strategi manajemen laba hanya tersedia pada perusahaan manufaktur (Rowchodhurry, 2006).

Selanjutnya sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan pertimbangan (*judgement*). Menurut Hartono (2017: 98) *pusposive sampling* merupakan metode sampling yang dilakukan dengan mengambil

sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria-kriteria perusahaan yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017 - 2018 tanpa *delisting*.
2. Perusahaan yang mengalami kerugian pada laporan keuangan (tidak mempunyai penghasilan bersih sebelum pajak sehingga tidak dapat dihitung nilai ETR nya)
3. Data yang disajikan tidak lengkap

4.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*) umumnya diperoleh dalam bentuk jadi, telah dikumpulkan, dan diolah oleh pihak lain, biasanya dalam bentuk publikasi. Data sekunder yang digunakan berupa laporan keuangan yang telah dipublikasi dan telah diaudit oleh akuntan publik. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan sampel yang bersumber dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

4.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini meliputi dua variabel independen yaitu kesulitan keuangan dan manajemen laba, variabel dependen yaitu agresivitas pajak, dan variabel moderasi yaitu *corporate governance* yang dalam penelitian ini direpresentasikan pada proporsi komisaris independen dan jumlah komite audit. Definisi operasional dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut.

4.4.1 Variabel Dependen

Variabel dependen pada penelitian ini adalah agresivitas pajak. Agresivitas pajak merupakan tindakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak baik secara legal guna memperkecil beban pajaknya. Cara untuk mengukur perusahaan yang melakukan agresivitas pajak yaitu dengan menggunakan proksi *effective tax rate* (ETR). Menurut Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa *Effective tax rate* (ETR) merupakan proksi yang paling banyak digunakan dalam literatur untuk mengukur agresivitas pajak. ETR merupakan ukuran kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi ETR maka semakin patuh perusahaan atas kewajiban pajaknya. Disisi lain agresivitas pajak merupakan ukuran ketidak patuhan, sehingga ETR di proksikan negatif(-). Dalam penelitian ini pengertiannya dibalik (dinegatifkan) menjadi semakin tinggi ETR maka semakin tinggi agresivitas pajak. Untuk menyesuaikan ukuran variabel dependen tersebut maka variabel independennya dikalikan minus 1 (-1), baik itu kesulitan keuangan (FD) maupun Manajemen Laba Riil (REM).

$$ETR = \frac{\text{Total Tax Expenses it}}{\text{Pre Tax Income it}}$$

4.4.2 Variabel Independen

Penelitian ini mengangkat dua variabel independen yang akan diteliti. Variabel independen meliputi kesulitan keuangan dan manajemen laba riil. Definisi operasional masing-masing variabel independen dijelaskan sebagai berikut.

4.4.2.1 Kesulitan Keuangan

Kesulitan keuangan merupakan tahap penurunan kondisi keuangan perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Penelitian ini

menggunakan model Altman (1968) yang dimodifikasi oleh Graham (1998) untuk mengukur kesulitan keuangan yang memiliki tingkat prediksi di atas 60% dan ukuran ini telah dipakai di berbagai negara dalam rangka memprediksi kesulitan keuangan suatu perusahaan (Nugroho dan Amrie, 2017). Prediksi tingkat kesulitan keuangan yang ditanggung perusahaan dapat diukur sebagai berikut.

$$Z = 1,2 \frac{\text{working capital}}{\text{total aset}} + 1,4 \frac{\text{laba ditahan}}{\text{total aset}} + 3,3 \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{total aset}} + 0,6 \frac{\text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{nilai buku hutang}} + 0,999 \frac{\text{penjualan}}{\text{total aset}}$$

Semakin tinggi nilai Z-Score yang dihasilkan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang semakin sehat. Untuk menyesuaikan pengukuran dengan variabel dependen Agresivitas Pajak yang arahnya dinegatifkan, maka nilai Z-Score yang dihasilkan dikalikan -1 (sehingga semakin besar nilainya mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang semakin buruk).

4.4.2.2 Manajemen Laba Riil

Manajemen laba riil merupakan tindakan oportunistik yang dilakukan oleh manajemen untuk memanipulasi angka laba pada laporan keuangan melalui aktivitas operasional nyata perusahaan yang dapat berdampak langsung pada arus kas perusahaan. Roychowdhury (2006) terdapat tiga pengukuran manajemen laba riil yang dapat dilakukan oleh manajer, yaitu: arus kas operasi abnormal, biaya produksi abnormal, dan biaya diskresioner abnormal. Pengukuran masing-masing ukuran disajikan sebagai berikut.

a. Arus kas operasi abnormal (Abnormal CFO)

$$\frac{CFO_{i,t}}{Assets_{i,t-1}} = \alpha_0 + \alpha_1 \frac{1}{Assets_{i,t-1}} + \beta_1 \frac{S_{i,t}}{Assets_{i,t-1}} + \beta_2 \frac{\Delta S_{i,t}}{A_{i,t-1}} + \varepsilon_{i,t}$$

Keterangan :

$CFO_{i,t}$: arus kas operasi perusahaan i pada tahun t

- A_{t-1} : aset total perusahaan i pada tahun t-1
 S_t : penjualan total perusahaan i pada tahun t
 ΔS_t : perubahan penjualan tahun t dibandingkan tahun t-1
 i : perusahaan
 t : tahun

Abnormal CFO adalah CFO aktual dikurangi dengan normal CFO yang dihasilkan dari perhitungan tersebut. Interpretasi dari arus kas operasi abnormal adalah semakin rendah arus kas operasi abnormal maka semakin tinggi perilaku manajemen laba riil yang dilakukan manajer.

b. Biaya produksi abnormal (Abnormal PROD)

Biaya produksi didefinisikan sebagai penjumlahan *Cost Of Goods Sold* (COGS) dan perubahan persediaan selama satu tahun. Model pengukuran COGS adalah sebagai berikut:

$$\frac{COGS_{it}}{Assets_{i,t-1}} = \alpha_0 + \alpha_1 \frac{1}{Assets_{i,t-1}} + \beta \frac{S_{it}}{Assets_{i,t-1}} + \varepsilon_{i,t}$$

Keterangan:

- $COGS$: Harga pokok penjualan
 $Assets_{t-1}$: total aset
 S_t : penjualan

Selanjutnya, model pengukuran perubahan persediaan sebagai fungsi linear adalah sebagai berikut :

$$\frac{\Delta INV_{it}}{Assets_{i,t-1}} = \alpha_0 + \alpha_1 \frac{1}{Assets_{i,t-1}} + \beta_1 \frac{\Delta S_{it}}{Assets_{i,t-1}} + \beta_2 \frac{\Delta S_{it-1}}{Assets_{i,t-1}} + \varepsilon_{i,t}$$

Keterangan :

- ΔINV_{it} : perubahan persediaan
 $Assets_{i,t-1}$: total asset
 ΔS_t : perubahan penjualan

Rowchowdhury (2006) merumuskan $Prod_{it} = COGS_{it} + \Delta INV_{it}$ dengan menggunakan kedua persamaan diatas, Menghitung koefisien dari estimasi biaya produksi normal menggunakan persamaan regresi berikut :

$$\frac{Prod_{it}}{Assets_{i,t-1}} = \alpha_0 + \alpha_1 \frac{1}{Assets_{i,t-1}} + \beta_1 \frac{S_{it}}{Assets_{i,t-1}} + \beta_2 \frac{\Delta S_{it}}{Assets_{i,t-1}} + \beta_3 \frac{\Delta S_{it-1}}{Assets_{i,t-1}} + \varepsilon_{i,t}$$

Keterangan :

PROD_t : Biaya produksi (*production cost*) perusahaan i tahun t

A_{t-1} : aset total perusahaan i pada tahun t-1

S_t : penjualan total perusahaan i pada tahun t

ΔS_t : perubahan penjualan tahun t dibandingkan tahun t-1

ΔS_{t-1} : perubahan penjualan tahun t-1 dibandingkan dengan penjualan akhir tahun t-2

Menghitung biaya produksi abnormal (APROD) adalah dengan cara mengurangi biaya produksi aktual dengan estimasi biaya produksi norma.

Interpretasi dari biaya produksi abnormal adalah semakin tinggi biaya produksi abnormal maka manajemen laba riil semakin tinggi.

c. Biaya diskresioner abnormal (Abnormal DISC)

$$\frac{DiscExp_{i,t}}{Assets_{i,t-1}} = k_1 \frac{1}{Assets_{i,t-1}} + k_2 \frac{S_{i,t-1}}{Assets_{i,t-1}} + \varepsilon_{i,t}$$

Keterangan :

DiscExp_t : total pengeluaran diskresioner (biaya iklan, biaya penelitian, dan pengembangan, serta biaya administrasi dan umum)

A_{t-1} : aset total perusahaan i pada tahun t-1

S_t : penjualan total perusahaan i pada tahun t

Interpretasi dari biaya diskresioner abnormal adalah semakin rendah biaya diskresioner abnormal maka semakin tinggi perilaku manajemen laba riil.

d. Manajemen laba riil gabungan

Sebagai ukuran keseluruhan dari manajemen laba riil maka arus kas operasi abnormal (Abnormal CFO), biaya produksi abnormal (Abnormal PROD), biaya diskresioner abnormal (Abnormal DISC) dijumlahkan. Untuk menyesuaikan dengan pengukuran variabel dependen Agresivitas Pajak (AP) yang arahnya dinegatifkan, maka hasil penjumlahan Manajemen Laba Riil dikalikan -1. Mengikuti Cohen *et al.*, (2008) manajemen laba riil dihitung sebagai berikut.

$$\text{REM} = (\text{Abnormal CFO}^* - 1) + \text{Abnormal PROD} + (\text{Abnormal DISC}^* - 1)$$

Keterangan :

CFO_i : Arus kas operasi (*cash flow from operation*) perusahaan i tahun t

PROD_i : Biaya produksi (*production cost*) perusahaan i tahun t

DISC_i : Biaya diskresioner (*discretioner expenses*) perusahaan i tahun t

Abnormal CFO : Arus kas operasi abnormal (*abnormal cash flow from operation*)

Abnormal PROD : Biaya produksi abnormal (*abnormal production cost*)

Abnormal DISC : Biaya diskresioner abnormal (*abnormal discretionary expenses*)

REM : Ukuran gabungan manajemen laba riil

A_{t-1} : Total aset perusahaan i pada tahun t

S_t : Total Penjualan (*sales*) perusahaan i pada tahun t

ΔS_t : Perubahan penjualan (*sales*) perusahaan i pada tahun t

ΔS_{t-1} : Perubahan penjualan (*sales*) perusahaan i pada tahun $t-1$

ε_t : Error

4.4.3 Variabel Moderasi

Variabel moderasi merupakan variabel yang mempunyai pengaruh ketergantungan yang kuat ada hubungan variabel terikat dan variabel bebas, dan kehadiran variabel moderasi mengubah hubungan awal antara variabel bebas dan terikat (Sekaran dan Bougie, 2017:80). Variabel moderasi bisa menguatkan dan juga bisa melemahkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel moderasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu *corporate governance*. *Corporate governance* merupakan salah satu konsep yang digunakan dalam meningkatkan efisiensi ekonomis antara manajemen perusahaan, dewan direksi, pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Corporate governance diukur menggunakan dua proksi yaitu komisaris independen dan komite audit.

a. Komisaris independen

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jml Anggota Dewan Komisaris dari Luar Perusahaan}}{\text{Seluruh anggota Dewan Komisaris di Perusahaan}} \times 100\%$$

b. Komite audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Adanya pengawasan dari komite audit yang intensif, maka informasi yang diberikan perusahaan akan lebih akurat dan berkualitas sehingga kemungkinan perusahaan melakukan pengaturan terhadap beban pajaknya cenderung berkurang. Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal. Komite audit paling sedikit terdiri dari 3 orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar perusahaan. Komite audit bertanggungjawab kepada dewan komisaris. Ukuran variabelnya adalah jumlah komite audit, mengingat dalam laporan keuangan tidak dipisahkan asal dari anggota komite audit, independen dan internal.

4.5. Metode Analisis Data

Uji analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis statistik deskriptif, dan analisis regresi moderasi.

4.5.1 Uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian ini meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

4.5.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel dependen dan variabel independen dalam model regresi berdistribusi normal, distribusi data mengikuti atau mendekati distribusi normal yakni ketika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, sedangkan apabila data menyebar jauh dari garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi-asumsi normalitas. Jika sampel pengamatan kurang dari 150 ($n < 150$), maka penelitian ini akan melakukan uji normalitas dengan menggunakan *Komogorov Smirnov Test*. Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ (Ghozali, 2011:160-165).

Uji tersebut tidak digunakan jika sampel pengamatan melebihi 150 ($n > 150$).

Pilihan uji normalitas lainnya seperti *skewness*, bisa digunakan meski juga sensitif terhadap sampel dengan jumlah besar.

4.5.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik yaitu ketika antar variabel independen tidak berkorelasi secara sempurna. Uji multikolinearitas dilakukan

dengan melihat nilai tolerance dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai tolerance $> 0,10$ maka tidak terjadi multikolinearitas pada data yang diuji. Apabila nilai tolerance $< 0,10$ maka terjadi multikolinearitas pada data yang diuji. Jika nilai VIF $< 10,0$ maka tidak terjadi multikolinearitas pada data yang diuji. Apabila nilai VIF $> 10,0$ maka terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji.

4.5.1.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang dibangun pada penelitian ini terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model penelitian yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas atau memiliki varian homogen. Untuk mengetahui adanya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan analisa grafis, diaman jika terdapat pola tertentu dari *scatter plot* maka terjadi heterokedastisitas. Model regresi yang baik tidak menghendaki adanya heterokedastisitas. Sahid (2014) dasar pengambilan keputusan pada uji heterokedastisitas yaitu jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi heterokedastisitas. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka terjadi heterokedastisitas. Model regresi tidak menderita heterokedastisitas apabila titik-titik tidak menunjukkan pola yang jelas dan menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Masalah heterokedastisitas akan lebih sering muncul pada data *cross-sectional* daripada *time series* (Naftali, 2007). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *cross-section*. Penulis memutuskan untuk menggunakan analisis regresi dengan pembobot, *weighted least square*. Maziyya, *et al.*, (2015) melakukan penelitian dengan pembobot $1/\sqrt{X_i}$, $1/X_i$, $1/E(Y_i)$ dan $1/\sigma$ (residual kuadrat). Crowson (2018), melakukan regresi dengan *weighted least square* dengan menggunakan pembobot kuadrat standar deviasi. Pembobot digunakan untuk model 1 dan 2

menggunakan residual kuadrat, sedangkan model 3 menggunakan kuadrat standar deviasi. Hal tersebut dilakukan agar model lolos heterokedastisitas dengan Uji Glejser.

4.5.1.4 Uji Autokorelasi

Data yang digunakan pada penelitian ini bersifat *cross saction*, sehingga tidak perlu dilakukan pengujian autokorelasi. Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada satu periode t dengan periode sebelumnya atau periode sesudahnya. Model yang baik adalah model yang tidak mengalami autokorelasi. Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan metode Durbin-Watson (*DW test*). Apabila nilai $du < dw < (4-du)$ maka tidak terjadi autokorelasi.

4.5.2 Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian ini melakukan analisis statistik deskriptif untuk memperoleh gambaran atau deskripsi mengenai variabel penelitian meliputi nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Variabel yang dianalisis meliputi kesulitan keuangan manajemen laba riil, agresivitas pajak, dan *corporate governance*.

4.5.3 Model Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi moderasi (*Moderated Regression Analysis-MRA*). Penggunaan metode MRA karena analisis ini dapat memberikan penjelasan yang lebih terperinci mengenai pengaruh antara variabel independen, variabel moderasi, dan variabel interaksi terhadap variabel dependen.

Pengujian dilakukan menggunakan software IBM SPSS Statistics 21.

Metode ini merupakan analisis regresi bertahap. Tahap-tahap MRA pada penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Menganalisis model regresi 1 penelitian dengan memasukan variabel dependen dan variabel independen. Model regresi 1 digunakan untuk menguji Hipotesis 1 dan Hipotesis 2.
2. Menganalisis model regresi 2 dan model regresi 3 penelitian dengan memasukan variabel dependen, variabel independen, variabel moderasi, dan interaksi antara variabel independen dengan variabel moderasi.

Model regresi 2 dan model regresi 3 digunakan untuk menguji Hipotesis 3, Hipotesis 4, Hipotesis 5 dan Hipotesis 6.

Berdasarkan dua tahapan MRA, maka tiga model regresi dibangun pada penelitian ini sebagai berikut.

Model 1

$$AP = \alpha_0 + \beta_1 FD + \beta_2 REM + \varepsilon_t$$

Model 2

$$AP = \alpha_0 + \beta_1 FD + \beta_2 REM + \beta_3 KI + \beta_4 KI * FD + \beta_5 KI * REM + \varepsilon_t$$

Model 3

$$AP = \alpha_0 + \beta_1 FD + \beta_2 REM + \beta_3 KA + \beta_4 KA * FD + \beta_5 KA * REM + \varepsilon_t$$

Keterangan :

AP : Agresivitas pajak (ETR) perusahaan i pada tahun t

FD : kesulitan keuangan perusahaan i pada tahun t

REM : Ukuran gabungan manajemen laba riil perusahaan i pada tahun t

KI : *Corporate Governance* (Proporsi Komisaris Independen) perusahaan i pada tahun t

KA : *Corporate Governance* (Jumlah Komite audit) perusahaan i pada tahun t

KI_FD : Moderasi variabel proporsi komisaris independen terhadap kesulitan keuangan

KI_REM : Moderasi variabel proporsi komisaris independen terhadap manajemen laba riil

KA_FD : Moderasi variabel proporsi jumlah komite audit terhadap kesulitan keuangan

KA_REM : Moderasi variabel jumlah komite audit terhadap manajemen laba riil

4.5.4 Kriteria Penerimaan atau Penolakan Hipotesis

Penelitian ini membangun empat hipotesis yang akan diuji. Hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 6 diuji menggunakan uji t. Pengujian melalui uji t dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel

independen terhadap variabel dependen, dan peran variabel moderasi pada pengaruh variabel independen dan variabel dependen. Penelitian ini digunakan

untuk melihat pengaruh kesulitan keuangan, manajemen laba riil terhadap agresivitas pajak dan peran moderasi *corporate governance* pada pengaruh kesulitan keuangan dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak.

Pengambilan kesimpulan atas hasil pengujian menggunakan nilai keyakinan 95%

(Hartono, 2017:201). Sahid (2014) dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi yaitu jika nilai signifikansi $<0,05$ maka variabel independen

berpengaruh terhadap variabel dependent. Jika nilai signifikansi $>0,05$ maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent.

Dalam penelitian ini tingkat kepercayaan yang paling umum digunakan dalam statistik, yaitu tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$), dan tingkat kepercayaan

99% ($\alpha = 0,01$).

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Penentuan Sampel

Sumber data dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2018. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling* (pengambilan sampel dengan kriteria tertentu). Jenis data adalah *cross-section*, tanpa melihat runtut waktu antara 2017 dan 2018. Kriteria yang digunakan untuk penelitian ini adalah : 1). Perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2017-2018. 2) perusahaan mengalami kerugian tidak memiliki penghasilan bersih sebelum pajak, sehingga tidak dapat dihitung nilai ETR nya. ETR adalah perbandingan antara pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan dengan penghasilan bersih sebelum pajak. Perlu ditambahkan bahwa 3) data dengan nilai ekstrim (outlier) yang menyebabkan distribusi tidak normal, dikeluarkan dari sampel pengamatan.

Tabel 5.1

Proses Seleksi Data Pengamatan

No	Kriteria	Data Pengamatan
1.	Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2017-2018	288
2	Perusahaan mengalami kerugian Tahun 2017 sebanyak 33 perusahaan dan tahun 2018 sebanyak 29 perusahaan	(62)
3	Data yang disajikan tidak lengkap Tahun 2017 sebanyak 7 perusahaan dan tahun 2018 sebanyak 6 perusahaan	(13)
	Total	213

5.2 Hasil Regresi Model Pengukuran Manajemen Laba Riil

Roychowdhury (2006) terdapat tiga pengukuran manajemen laba riil yang dapat dilakukan oleh manajer, yaitu: arus kas operasi abnormal, biaya produksi abnormal, dan biaya diskresioner abnormal. Untuk ukuran manajemen laba riil merupakan gabungan dari arus kas operasi abnormal, biaya produksi abnormal, dan biaya diskresioner abnormal. Mengikuti Cohen *et al.*, (2008) manajemen laba riil dihitung sebagai berikut. Abnormal CFO dan Abnormal DISC dikalikan -1 untuk menyamakan arah terhadap manajemen laba riil.

Tabel 5.2
Hasil Analisis Regresi Manajemen Laba Riil

	CFO/ A _{t-1}	PROD/ A _{t-1}	DISEXP/ A _{t-1}
1/A _{t-1}	-7,308E+5 ^{***} (0,000)	-1,593E+7 (0,052)	9,226E+6 ^{***} (0,000)
S _t / A _{t-1}	0,014 ^{***} (0,000)	0,866 ^{***} (0,000)	
Δ S _t // A _{t-1}	-0,021 ^{***} (0,001)	0,200 ^{***} (0,000)	
Δ S _{t-1} // A _{t-1}		0,145 ^{***} (0,000)	,007 (0,061)
F-Value	417,802 ^{***})	2276,2 ^{***})	17,092 ^{***})
Adjusted R Square	0,855	0,977	0,132

^{**}) Signifikan pada level 95%

^{***}) Signifikan pada level 99%

Pada tabel 5.2 disajikan data hasil regresi yang menunjukkan bahwa semua koefisien nilai F adalah signifikan. F-hitung > F-tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa model pengukuran masing-masing ukuran manajemen laba

dapat digunakan. Nilai residual dari masing-masing persamaan regresi digunakan untuk memperoleh nilai manajemen laba gabungan.

Berdasarkan data sampel pengamatan dan hasil penghitungan, untuk menguji hipotesa yang dibangun dilakukan regresi linier berganda. Untuk memastikan bahwa kelayakan persamaan (model) yang digunakan, maka atas hasil regresi linier berganda dilakukan beberapa uji seperti uji statistik deskriptif, Uji R Square, Uji F, Uji t-hitung dan Uji Asumsi Klasik.

5.3 Hasil Regresi Linier Berganda

Pada bagian ini menyajikan hasil analisis pengujian regresi berganda hirarki yang telah dibangun. Pengujian meliputi uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis penelitian

5.3.1 Hasil Analisis statistik deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi awal suatu data yang diteliti, meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Data pokok yang dianalisis meliputi nilai agresivitas pajak (AP), kesulitan keuangan atau Financial Distress (FD) dan manajemen laba riil (REM). Ditambahkan variabel moderator berupa rasio komisaris independen (KI) dan jumlah komite audit (KA). Tabel 5.3 menyajikan hasil pengujian analisis statistik deskriptif masing-masing variabel.

Data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari 144 perusahaan manufaktur pada periode pengamatan dimulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Sifat data adalah *cross-section* bukan *time series*. Teknik pengambilan sample adalah purposive sampling. Total data pengamatan yang memenuhi kriteria yang ditentukan adalah sebesar 213 data.

Tabel 5.3
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimal	Maksimal	Rata-rata	Std. Deviasi
AP	213	0,001	0,971	0,27240	0,154
FD	213	-14,770	-0,348	-3,12881	2,024
REM	213	-37,207	0,772	-2,88504	3,152
KI	213	-1,000	0,000	-0,38522	0,146
KA	213	-5,000	-2,000	-3,05400	0,253

Keterangan: AP = Agresivitas Pajak, FD = Finincial Distress, REM = Manajemen Laba Riil, KI = Proporsi Komisaris Idependen, KA = Jumlah Komite Audit

Cara untuk mengukur perusahaan yang melakukan agresivitas pajak yaitu dengan menggunakan proksi *Effective Tax Rates* (ETR). ETR bertujuan untuk melihat beban pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan dibandingkan dengan laba sebelum pajak (EBIT). Perusahaan dengan EBIT minus, dikeluarkan dari kriteria sampel pengamatan. Adanya nilai minus adalah karena pajak yang dibayarkan lebih kecil dari restitusi pajak. Pengukuran ETR memakai proxy negatif, sehingga semakin tinggi nilai ETR, maka semakin tinggi peluang terjadi agresivitas pajak. Berdasarkan tabel 5.3, diketahui bahwa nilai ETR data pengamatan berkisar antara 0,001 sampai dengan 0,971 dengan rata-rata 0,272 dan standar deviasi sebesar 0,154.

Variabel kesulitan keuangan menyesuaikan dengan proksi negatif ETR, dikalikan -1. Berdasar tabel, diketahui bahwa nilai data kesulitan keuangan antara -14,770 sampai dengan -0,348, dengan rata-rata 3,129 dan standar deviasi sebesar 2,024.

Manajemen laba riil (REM) diproksikan sebagai penjumlahan dari abnormal cash flow from operation (CFO), abnormal produksi (PROD) dan abnormal biaya diskresi (DISC). Angka diperoleh dari residual hasil regresi model sebagaimana Tabel 5.2. Untuk menyesuaikan proksi negatif dari ETR, maka

residual CFO dan DISC dikalikan -1. Berdasarkan Tabel 5.3 diketahui bahwa nilai residual manajemen laba riil sebagai proksi abnormal berkisar antara -37,207 sampai dengan 0,772. Rata-rata sebesar -2,885, dengan standar deviasi 3,152.

Data pengamatan manajemen laba riil juga cukup menyebar dapat dilihat dari nilai standar deviasi yang lebih tinggi dari nilai rata-rata.

Selanjutnya berdasarkan tabel, diketahui bahwa nilai proporsi komisaris independen di perusahaan sampel pada saat tahun pengamatan berada antara 0,000 sampai dengan 1 (proksi negative). Nilai nol, menunjukkan bahwa pada perusahaan tersebut pada saat pengamatan, tidak ada komisaris independen.

Rata-rata sebesar -0,38522 dengan standar deviasi 0,145. Variabel moderator lainnya adalah komite audit. Berdasarkan data laporan keuangan perusahaan tidak diketahui komite audit berasal dari luar perusahaan ataukah dari internal, sehingga ukuran yang dipakai adalah jumlah komite audit. Jumlah komite audit data pengamatan berkisar antara 3 sampai dengan 5 (proksi negatif), dengan rata-rata 3,05 dan standar deviasi sebesar 0,253.

5.3.2 Hasil Uji Asumsi Klasik Analisis Regresi

Bagian ini menunjukkan hasil analisis asumsi klasik terhadap model-model penelitian yang telah dibangun. Dalam penelitian ini menggunakan tiga model.

Model 1 untuk melihat pengaruh variabel langsung variabel independen terhadap variabel dependen secara langsung. Model 2 adalah untuk melihat efek interaksi antara variabel independen dengan variabel moderasi proporsi komisaris independen terhadap variabel dependen. Model 3 adalah untuk melihat efek interaksi antara variabel independen dengan variabel moderasi jumlah komite audit terhadap variabel dependen. Data-data yang digunakan pada penelitian ini harus memenuhi uji asumsi klasik agar hasil analisis persamaan regresi menjadi valid dan menghasilkan model regresi yang BLUE (*Best Linear Unbias Estimator*).

Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui residual dari model regresi yang dibangun berdistribusi normal. Data dengan $n > 30$, dapat dianggap berdistribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat nilai

skewness, atau dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test*. Uji tersebut sangat cocok untuk data dengan $30 < n < 150$, jumlah sampel sedang.

Data untuk sampel pengamatan lebih dari 150 ($n > 150$), jika digunakan

Kolmogorov-Smirnov Test hasilnya kecenderungan tidak normal. Hanif

Akhtar (2019), menyatakan bahwa jika data mencapai 300 sampel pengamatan, hasilnya pasti tidak normal. Maka uji tersebut tidak disarankan.

Uji normalitas terbaik yang disarankan ahli statistik adalah uji skewness

yang dilakukan dengan membagi nilai skewness residual hasil regresi

dengan standar error (SE) untuk memperoleh Z-skewness. Nilai Z-

skewness untuk distribusi normal berkisar -2 sd 2 (sig. 0,05) dan -2,58 sd

2,58 (sig. 0,01). Uji skewness, lebih cocok untuk data dengan jumlah sampel

dibawah 200 ($n < 200$), karena semakin banyak data semakin kecil standar

error sebagai pembagi nilai skewness. Field (2009), menyarankan jika

sampel besar, uji normalitas cukup dilakukan dengan melihat nilai skewness

dan kurtosisnya saja, tanpa membagi dengan standar errornya.

Tabel 5.4
Hasil Uji Normalitas

	Skewness	S. Error	z-Skewness	Keterangan
Model 1	1,707	,167	1,707	Data Normal
Model 2	1,722	,167	1,722	Data Normal
Model 3	1,741	,167	1,741	Data Normal

Keterangan : Menggunakan standar Field (2009)

Dari tabel 5.4, diketahui bahwa semua residual dari model mempunyai nilai skeweness antara -2 sampai dengan 2 dan nilai z-skewness antara -2 sampai dengan 2 (sehubungan data jumlah besar, $n > 200$ maka menggunakan pendapat Field(2009)). Berdasarkan hasil ini maka dapat diinterpretasikan bahwa semua residual hasil regresi berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik adalah antara variabel-variabel independen tidak memiliki korelasi yang sempurna. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Vector* (VIF). Jika nilai VIF kurang dari 10 dan atau nilai *Tolerance* lebih dari 0,01 maka dapat disimpulkan dengan tegas bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas.

Hidayat (2016) menyatakan bahwa salah satu penyebab multikolinearitas adalah adanya perhitungan sebuah variabel bebas yang didasarkan pada variabel bebas lainnya dalam model. Variabel moderasi termasuk kategori ini, sehingga model rawan terjadi multikolinearitas. Pada persamaan regresi yang melibatkan adanya variabel moderating, ada 3 (tiga) alternatif metode analisis regresi, yaitu (1) *Moderated Regression Analysis*

dengan menambahkan perkalian antara variabel independen dengan variabel moderatingnya, yang karena adanya interaksi variabel bebas, maka tidak bebas multikolinearity. (2) Absolut Residual, Model ini mirip dengan MRA, tetapi variabel moderating didekati dengan selisih mutlak (absolut residual) antara variabel bebas dengan variabel moderatingnya. Penerimaan hipotesis juga sama, dan model ini masih riskan terhadap gangguan multikolinearitas meskipun risiko itu lebih kecil dari pada dengan metode MRA dan (3) Residual menggunakan konsep *lack of fit* yaitu hipotesis moderating diterima terjadi jika terdapat ketidakcocokan dari deviasi hubungan linear antara variabel independen. Langkahnya adalah dengan meregresikan antara independen terhadap variabel moderasi dan dihitung nilai residualnya. kemudian variabel dependen diregresikan terhadap nilai absolut residual. Hipotesis moderating diterima jika nilai t hitung adalah negatif dan signifikan. Model ini terbebas dari gangguan multikolinearitas karena hanya menggunakan satu variabel bebas (Pascal Smart Consulting, 2009).

Pada penelitian ini, Model 2 dan Model 3 melibatkan variabel moderasi, maka peneliti menempuh dua cara, yaitu cara pertama dan interpretasi hasilnya menggunakan cara ketiga. Tabel 5.5 menyajikan hasil pengujian multikolinearitas.

Tabel 5.5
Hasil Uji Multikolinearitas

	Model 1		Model 2		Model 3	
	Tolerance	VIF	Tolerance	VIF	Tolerance	VIF
FD	,877	1,140	,017	58,825	,006	176,697
REM	,877	1,140	,067	14,874	,002	592,218
KI			,009	108,16		
KI_FD			,005	192,61		
KI_REM			,036	27,783		
KA					,245	4,079
KA_FD					,006	173,516
KA_REM					,002	578,942

Berdasarkan data di atas, nilai Tolerance untuk Model 1, variabel FD, REM semuanya $> 0,10$, maka disimpulkan tidak terjadi multikolenieritas antar variabel independen. Selanjutnya diketahui bahwa nilai VIF semua variabel juga < 10 , maka disimpulan bahwa pada semua model persamaan tidak terjadi multikoleniaritas antar variabel independennya.

Untuk model 2 dan model 3, seperti yang diduga terjadi multikolinearitas yang serius karena adanya interaksi antara variabel moderating dengan variabel independen. Untuk variable yang signifikan berpengaruh yaitu KI_FD dan KA_FD. Untuk memastikan kebenaran dari persamaan, maka dilakukan analisis residual dengan meregresikan variabel independen terhadap variabel moderating (variabel moderating sebagai dependen). Selanjutnya variabel dependen diregresikan terhadap nilai absolut residual (absolut residual sebagai dependen). Jika t-test menunjukkan angka negatif (-) dan signifikan, maka dianggap bahwa ada peran variabel moderasi. Untuk variable moderating selain KI_FD dan KA_FD, tidak dilakukan uji residual karena tidak signifikan berpengaruh.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Pada jenis data *cross-section* dengan jumlah data yang relatif besar, sebagian besar ahli statistik menyarankan untuk menguji dengan *scatter plot* atau jika masih ragu menggunakan analisis regresi dengan pembobot yaitu *Weighted Least Square (WLS)*, dengan pertimbangan tersebut, peneliti memutuskan untuk menggunakan pembobot (*weighted*).

Maziyya *et al.*, (2015) melakukan penelitian dengan pembobot $1/\sqrt{X_i}$, $1/X_i$, $1/E(Y_i)$ dan $1/\sigma$ (residual kuadrat). Pembobot yang digunakan untuk model 1 dan 2 menggunakan residual kuadrat. Model 3 menggunakan prediktor (Y_i).

Uji heterokedastisitas dilakukan dengan Uji Glejser, yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap semua variabel independen.

Jika variabel independen mempunyai tingkat signifikansi $<0,05$ maka terdapat heterokedastisitas. Berdasarkan hasil Uji Glejser sebagaimana Tabel 5.6, semua model tidak ada indikasi heterokedastisitas. Berarti homokedastisitas.

Tabel 5.6

Hasil Uji Glejser (Uji Heterokedastisitas)

	Model 1		Model 2		Model 3	
	t-hitung	sig.	t-hitung	sig.	t-hitung	sig.
FD	,013	,989	,186	,853	,580	,563
REM	,503	,615	,929	,354	,1506	,134
KI			,108	,914		
KI_FD			-,027	,979		
KI_REM			-,004	,997		
KA					1,400	,163
KA_FD					,293	,770
KA_REM					-,1525	,129

5.3.3 Hasil dan Analisis Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh kesulitan keuangan dan manajemen laba riil terhadap perilaku agresivitas pajak serta peran moderasi proporsi komisaris independen dan jumlah komite audit pada pengaruh kesulitan keuangan dan manajemen laba riil terhadap perilaku agresivitas pajak. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Tabel 5.8 menampilkan hasil pengujian hipotesis penelitian ini.

Tabel 5.7

Hasil Regresi Linier Berganda

	Model 1			Model 2			Model 3		
	Coef.	T Statistik	Prob	Coef.	T Statistik	Prob	Coef.	T Statistik	Prob
Konstanta	,310	222,221	,000	,224	41,211	,000	,086	,877	,381
FD	,009	22,506	,000	-,011	-12,595	,000	-,367	-9,952	,000
REM	,003	12,298	,000	,007	8,746	,000	,221	4,278	,000
KI				-,218	-15,827	,000			
KI_FD				-,048	-20,779	,000			
KI_REM				,007	3,094	,000			
KA							-,074	-2,723	,007
KA_FD							-,125	-10,479	,000
KA_REM							,073	4,238	,000
F-Value		485,378	,000		1265,7	,000		64,378	,000
Adj. R2		,820			,967			,599	

Berdasarkan Tabel 5.7 di atas, maka diinterpretasikan persamaan yang dibentuk

dari :

Model 1

$$AP = 0,310 + 0,009 \text{ FD} + 0,003 \text{ REM} + \text{et}$$

Model 2

$$AP = 0,224 - 0,011 \text{ FD} + 0,007 \text{ REM} - 0,218 \text{ KI} - 0,048 \text{ KI_FD} + 0,007 \text{ KI_REM} + \text{et}$$

Model 3

$$AP = 0,200 + 0,016 FD - 0,059 REM + 0,029 KA + 0,003 KA_FD - 0,020 KA_REM + \epsilon$$

1. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan variabel independen dalam model menjelaskan variabel dependen. Tabel 5.7 menunjukkan besaran nilai *adjusted* R^2 untuk tiga model regresi yang digunakan. Model 1 memiliki nilai *adjusted* R^2 sebesar 0,820 yang berarti bahwa variabel independen pada model pertama yaitu kesulitan keuangan dan manajemen laba riil mampu menjelaskan variabel dependen yaitu nilai perusahaan sebesar 82% sedangkan sisanya sebesar 18% dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya di luar model yang dibangun.

Pada model kedua nilai *adjusted* R^2 sebesar 0,967 yang berarti bahwa kesulitan keuangan, manajemen laba riil, proporsi komisaris independen dan interaksinya dengan kesulitan keuangan serta manajemen laba riil mampu menjelaskan variabel dependen yaitu nilai perusahaan sebesar 96,7% sedangkan sisanya sebesar 3,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya di luar model yang dibangun.

Pada model kedua nilai *adjusted* R^2 sebesar 0,599 yang berarti bahwa kesulitan keuangan, manajemen laba riil, jumlah komite audit dan interaksinya dengan kesulitan keuangan serta manajemen laba riil mampu menjelaskan variabel dependen yaitu nilai perusahaan sebesar 59,9% sedangkan sisanya sebesar 40,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya di luar model yang dibangun.

2. Uji F

Uji F dalam analisis regresi berganda digunakan untuk menentukan signifikansi keseluruhan model regresi berganda. Uji ini dilakukan untuk melihat signifikansi pengaruh keseluruhan variabel independen terhadap

variabel dependen. Tabel 5.7 menunjukkan nilai F-Hitung dari Model persamaan yang dibuat. Pada model 1, nilai F-hitung sebesar 485,378 dengan nilai signifikansi $0,00 < 0,05$ dengan tingkat kepercayaan 95% menunjukkan bahwa variabel kesulitan keuangan dan manajemen laba riil secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap perilaku agresivitas pajak.

Selanjutnya pada model 2, nilai F-hitung sebesar 1248,68 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dengan tingkat kepercayaan 95% menunjukkan bahwa variabel kesulitan keuangan, manajemen laba riil, proporsi komisaris independen beserta interaksinya dengan kesulitan keuangan dan manajemen laba riil secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap perilaku agresivitas pajak.

Pada model 3, nilai F-hitung sebesar 64,378 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dengan tingkat kepercayaan 95% menunjukkan bahwa variabel kesulitan keuangan, manajemen laba riil, jumlah komite audit beserta interaksinya dengan kesulitan keuangan dan manajemen laba riil secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap perilaku agresivitas pajak. Berdasarkan Uji F, disimpulkan bahwa semua model dapat dipergunakan untuk memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel terikat.

3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis yang pertama (H_1) adalah untuk melihat pengaruh langsung kesulitan keuangan dan manajemen laba riil terhadap agresivitas pajak. ETR merupakan ukuran kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi ETR semakin patu perusahaan atas kewajiban pajaknya. Disisi lain agresivitas pajak merupakan ukuran ketidak patuhan, sehingga nilai ETR diproksikan negatif.

a) Uji Hipotesis (H_1)

Hasil pengujian Hipotesis 1 disajikan pada Tabel 5.7 Model 1 yang menunjukkan nilai koefisien variabel kesulitan keuangan (FD) positif sebesar 0,009 dengan angka probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya bahwa variabel kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan akan cenderung untuk menggunakan utang sebagai modal untuk operasional perusahaan selain itu penggunaan utang juga dapat menimbulkan beban bunga sehingga dapat mengurangi pendapatan kena pajak. Semakin tinggi kesulitan keuangan perusahaan maka semakin tinggi agresivitas pajak, dengan demikian H_1 diterima.

Pada model 2 dengan memasukan variabel moderasi proporsi komisaris independen dan variabel interaksi pengaruh kesulitan keuangan terhadap agresivitas pajak. Variabel kesulitan keuangan pada model 2 menunjukkan nilai koefisien negatif sebesar -0,011 dengan angka signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$ menunjukkan bahwa kesulitan keuangan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap agresivitas. Hal tersebut tidak sesuai teori. Penyebab utamanya karena model tidak bebas multikolinearitas. Pada model 3, variabel kesulitan keuangan mempunyai hubungan negatif terhadap agresivitas pajak dengan nilai koefisien negatif -0,367 dengan angka signifikansi nya sebesar $0,00 < 0,05$ yang berarti pengaruhnya signifikan. Akan tetapi koefisiennya tidak searah. Variabel ini tidak bebas multikolinearitas.

b) Uji Hipotesis (H_2)

Selanjutnya hasil pengujian Hipotesis 2 disajikan pada Tabel 5.7 Model 1 yang menunjukkan nilai koefisien variabel manajemen laba riil (REM) positif sebesar 0,003 dengan angka probabilitas sebesar $0,00 < 0,05$. Artinya bahwa variabel manajemen laba riil berpengaruh positif terhadap agresivitas

pajak. Manajemen cenderung akan memperbesar biaya termasuk untuk bonus sehingga dapat memperkecil beban pajaknya. Semakin tinggi manajemen laba riil perusahaan maka semakin tinggi agresivitas pajak, dengan demikian H_2 diterima.

Pada model 2 dengan memasukan variabel moderasi jumlah komite audit dan variabel interaksi pengaruh manajemen laba riil terhadap agresivitas pajak. Variabel manajemen laba riil pada model 2 menunjukkan nilai koefisien positif sebesar 0,007 dengan angka signifikansi sebesar $< 0,05$ (tingkat kepercayaan. 95%), menunjukkan bahwa manajemen laba riil ada hubungan positif terhadap agresivitas. Pada model 3, variabel manajemen laba riil menunjukkan nilai koefisien positif sebesar 0,221 dengan angka signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$ (tingkat kepercayaan. 95%), menunjukkan bahwa manajemen laba riil ada hubungan positif terhadap agresivitas.

c) Uji Hipotesis (H_3 , H_4 , H_5 dan H_6)

Selanjutnya terkait *corporate governance* yang diwakili proporsi komisaris independen dan jumlah komite audit, diuraikan secara terpisah sebagaimana berikut :

- 1) Pada model 2 dan 3, dikarenakan pada persamaan ada interaksi antara variabel moderasi dengan variabel independen, maka sebagaimana disampaikan para ahli statistik, terjadi multikolinearitas yang serius antara variabel independen, maka untuk memastikan hasil pengujian, dilakukan analisis residual dengan meregresikan variabel independen terhadap variabel moderating untuk variable interaksi yang signifikan berpengaruh dan arahnya menunjukkan negative, yaitu KI_FD dan KA_FD . Selanjutnya variabel dependen diregresikan terhadap nilai absolut residual. Jika t-test menunjukkan angka negatif (-) dan signifikan,

maka dianggap bahwa ada peran variabel moderating. Hasil analisis residual sebagaimana Tabel 5.8

Tabel 5.8
Analisis Residual Variabel Moderasi

	Moderasi Komisaris Independen (KI)	Moderasi Komite Audit (KA)
	KI_FD	KA_FD
t-hitung	-1,720*)	,475
Sig.	0,070	0,635

*) signifikan pada tingkat kepercayaan 90%

2) Pada model 2 berdasarkan tabel 5.7 diketahui bahwa moderasi variabel proporsi komisaris independen terhadap kesulitan keuangan mempunyai pengaruh yang signifikan pada agresivitas pajak. Pada model 2 menunjukkan koefisien negatif sebesar -0,011 dengan angka signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$ menunjukkan bahwa memoderasi variable kesulitan keuangan dan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Tetapi berdasarkan nilai VIF menunjukkan bahwa model tidak bebas multikolinearitas, sehingga perlu dilakukan analisis residual sebagaimana tabel 5.8. Diketahui bahwa t-hitung negatif (-) dan signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa moderasi proporsi jumlah komisaris independen terhadap kesulitan keuangan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dan ini sejalan dengan hipotesis, dengan demikian H_3 diterima.

3) Pada model 3 berdasarkan tabel 5.7 diketahui bahwa moderasi variabel jumlah komite audit terhadap kesulitan keuangan berpengaruh negative pada agresivitas pajak. Tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ (df. 95%), Tetapi berdasarkan nilai VIF menunjukkan bahwa model tidak bebas multikolinearitas, sehingga perlu dilakukan analisis residual sebagaimana tabel 5.8. Diketahui bahwa t-hitung positif (+) dan tidak signifikan, maka

dapat disimpulkan bahwa moderasi jumlah komite audit terhadap kesulitan keuangan tidak berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dan ini tidak sejalan dengan hipotesis. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh pembentukan komite audit yang didasari sebatas untuk pemenuhan regulasi, sehingga mengakibatkan kurang efektifnya peran komite audit dalam memonitor kinerja manajemen, dengan demikian H_4 ditolak.

4) Selanjutnya moderasi proporsi komisaris independen terhadap manajemen laba riil juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Akan tetapi koefisiennya positif (+) tidak sejalan dengan teori. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen tidak memberikan kontribusi yang positif dan efektif dalam menjalankan tanggung jawab dan tugasnya dalam memonitor kualitas pelaporan keuangan, dengan demikian H_5 , ditolak.

5) Selanjutnya moderasi jumlah komite audit terhadap manajemen laba riil signifikan berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Akan tetapi koefisiennya positif (+) tidak sejalan dengan teori. Maka dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak memoderasi manajemen laba riil. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh pembentukan komite audit yang didasari sebatas untuk pemenuhan regulasi, sehingga mengakibatkan kurang efektifnya peran komite audit dalam memonitor kinerja manajemen, dengan demikian H_6 , ditolak.

6) Sebagai catatan berdasarkan model 2 dan 3, bahwa variable komisaris independent dan komite audit, secara sendiri (bukan sebagai variable moderasi) ternyata berpengaruh negative signifikan terhadap agresivitas pajak..

Ringkasan hasil pengujian hipotesis disajikan pada Tabel 5.9

Tabel 5.9

Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Pernyataan Hipotesis	Keputusan
H1 Kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.	Didukung
H2 Manajemen laba riil berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.	Didukung
H3 <i>Corporate Governance</i> (Proporsi komisaris independen) memperlemah pengaruh kesulitan keuangan terhadap agresivitas pajak.	Didukung
H4 <i>Corporate Governance</i> (jumlah komite audit) memperlemah pengaruh kesulitan keuangan terhadap agresivitas pajak.	Tidak Didukung
H5 <i>Corporate Governance</i> (Proporsi komisaris independen) memperlemah pengaruh manajemen laba riil terhadap agresivitas pajak.	Tidak Didukung
H6 <i>Corporate Governance</i> (jumlah komite audit) memperlemah pengaruh manajemen laba riil terhadap agresivitas pajak.	Tidak Didukung

5.4 Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis

Bagian ini berisi pembahasan mengenai hasil pengujian hipotesis.

Pembahasan dimulai dari hasil pengujian hipotesis 1 sampai dengan 6.

5.4.1 Kesulitan Keuangan Mempengaruhi Perilaku Agresivitas Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung lebih agresif dalam penghindaran pajak.

Perusahaan yang terjebak dalam kesulitan keuangan, kondisi kebutuhan akan kas semakin kritis, sehingga untuk mempertahankan agar perusahaannya tetap berdiri, seringkali perusahaan mengambil risiko, apalagi jika beban pajak

perusahaan menjadi hal utama dalam *cash outflow*. Manajemen cenderung akan mengesampingkan kemungkinan reputasi negatif yang didapat sehingga secara agresif melakukan penghindaran pajak.

Perusahaan yang terjebak dalam kesulitan keuangan berpotensi memanipulasi kebijakan akuntansi mereka dengan tujuan menaikkan penghasilan operasional untuk sementara waktu agar bisa melunasi hutang mereka, atau memanipulasi kemampuan mereka untuk membayar hutang kepada kreditor. Asumsinya, penghindaran pajak tidak serta merta terdeteksi oleh auditor pajak, perlu waktu, dan ada kemungkinan tidak terdeteksi.

Penundaan pembayaran utang akan menambah beban bunga. Denda keterlambatan pembayaran karena temuan auditor dari regulator sebesar 2% per bulan, mungkin dianggap relatif kecil sehingga menjadi pertimbangan untuk melakukan penghindaran, apalagi jika ada kemungkinan tidak terdeteksi. Ada jeda waktu antara tindakan penghindaran pajak dengan pelaksanaan audit oleh regulator.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dan hasil ini mendukung Hipotesis 1. Maka dengan ini memberikan bukti bahwa ketika perusahaan menghadapi kesulitan keuangan, maka perusahaan akan berusaha untuk melakukan agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya oleh Saputra *et al.* (2017), Putri dan Anis (2017), Richardson *et al.* (2015), Warsini, *et al.* (2018) terdapat hubungan positif antara kesulitan keuangan dan penghindaran pajak. Ketika perusahaan mengalami kondisi kesulitan keuangan maka manajemen akan berusaha mempertahankan keberlanjutan usahanya dengan cara memperbesar laba, dengan asumsi bahwa investor akan tetap tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan dan kegiatan operasional perusahaan dapat tetap berjalan.

Hasil penelitian ini mendukung teori akuntansi positif dan *trade-off theory*.

Berdasarkan teori akuntansi positif perusahaan akan memilih kebijakan akuntansi yang akan menguntungkan pihak perusahaan untuk mempertahankan keberlanjutan usahanya. Berdasarkan *trade-off theory* yang menyatakan bahwa utang dapat menimbulkan beban bunga, beban bunga dapat mengurangi pendapatan sehingga laba sebelum pajak menjadi lebih kecil, dengan demikian pajak juga semakin kecil. Perusahaan yang mengalami kondisi kesulitan keuangan akan terdorong untuk melakukan penghindaran pajak guna mengurangi arus kas keluar dan beban perusahaan (Rani, 2017).

5.4.2 Manajemen Laba Riil mempengaruhi perilaku agresivitas pajak

Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa perilaku manajemen laba riil berpengaruh positif secara signifikan terhadap perilaku agresivitas pajak. Pola dalam manajemen laba riil biasanya dengan meratakan laba, sehingga perusahaan terlihat stabil dan menarik investor untuk berinvestasi. Manajemen laba riil dapat dilakukan dengan cara manipulasi penjualan, penurunan beban-beban diskresionari dan produksi yang berlebihan. Roychowdhury (2006) menyatakan bahwa campur tangan manager dalam proses pelaporan keuangan tidak hanya melalui metode-metode atau estimasi-estimasi akuntansi saja tetapi juga dapat dilakukan melalui keputusan-keputusan yang berhubungan dengan kegiatan operasional. Lebih lanjut, manager juga memiliki kesempatan untuk memanipulasi aktivitas-aktivitas riil selama tahun berjalan untuk memenuhi target laba.

Mengacu dari persamaan model penentu nilai manajemen laba riil pada Tabel 5.2, berdasarkan sampel pengamatan adalah tindakan manipulasi dalam produksi yang terindikasi berlebihan, diikuti pengurangan biaya iklan, *research and development (R&D)* dan sejenisnya (*diskretionare*) serta manipulasi

penjualan yang berimplikasi ke laba dan pembayaran pajak. Tindakan manajemen laba riil sifat aktifitasnya riil agak sulit terdeteksi. Aktifitas tersebut dirancang secara sengaja untuk membuat laba pada tingkat tertentu yang sifatnya tidak ada gejala, sehingga menarik investor untuk masuk. Dengan menyatakan laba yang tidak sebenarnya berpengaruh terhadap pembayaran pajak.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa manajemen laba riil berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dan hasil ini mendukung Hipotesis 2. Hal ini memberikan bukti bahwa perusahaan melakukan manajemen laba riil dengan motivasi untuk melakukan agresivitas pajak.

Hasil ini mendukung teori akuntansi positif yang menyatakan bahwa perusahaan akan melakukan manajemen laba untuk memaksimalkan *utilitasnya* dengan cara melaporkan laba yang tidak sebenarnya untuk menarik investor sehingga dapat menyesatkan pemangku kepentingan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Karinda (2018), Nugroho dan Amrie (2017), Lolana dan Susi (2019), Arief, *et al.* (2016), Geraldina (2013) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara manajemen laba dan agresivitas pajak. Perusahaan lebih mungkin menggunakan pilihan akuntansi yang mengurangi laba (*income decreasing*) yang dilaporkan untuk menurunkan pendapatan kena pajak sehingga perusahaan dapat melakukan penghematan atas beban pajak (Putra dan Elly, 2018).

5.4.3 Komisaris Independen (*Corporate Governance*) sebagai Variabel Moderasi Memperlemah Pengaruh kesulitan keuangan Terhadap Agresivitas Pajak

Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa komisaris independen (*corporate governance*) memperlemah kesulitan keuangan dan berpengaruh

negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil ini sejalan dengan temuan oleh Hanifah dan Agus (2013), Hanum dan Zulaikha (2013), Rosidy dan Rahadi (2019), Diantari dan Ulupui (2016), Radifan dan Etna (2015) yang menyatakan bahwa adanya komisaris independen maka dapat menghindari terjadinya asimetri informasi antara *agent* dan *principal* yang dapat menimbulkan kondisi kesulitan keuangan perusahaan. Semakin besar proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan maka pengawasan perusahaan juga akan semakin besar, maka manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan lebih transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga meminimalkan terjadinya agresivitas pajak.

5.4.4 Komite Audit (*Corporate Governance*) sebagai Variabel Moderasi Memperlemah Pengaruh kesulitan keuangan Terhadap Agresivitas Pajak

Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa komite audit (*corporate governance*) dan kesulitan keuangan tidak berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil ini tidak sejalan dengan temuan oleh Novitasari (2017), Putri dan Anis (2017) dengan adanya pengawasan dari komite audit yang intensif, maka informasi yang diberikan perusahaan akan lebih akurat dan berkualitas sehingga kemungkinan perusahaan melakukan pengaturan terhadap beban pajaknya cenderung kecil. Jumlah anggota komite audit yang tepat dapat membuat anggota komite audit menggunakan pengalaman dan keahlian yang dimiliki untuk melindungi kepentingan pemegang saham, sehingga dapat memperkecil kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan.

Berdasarkan hal tersebut, komite audit dengan wewenang yang dimilikinya akan dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan. Adanya komite audit dalam perusahaan dapat

meminimalisir terjadinya praktik *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rani (2017) menyatakan bahwa jumlah komite audit yang bertugas melakukan *monitoring* penyusunan laporan keuangan perusahaan belum dapat menjamin komite audit untuk mencegah pihak manajemen dalam melakukan kecurangan. Keefektifan komite audit tidak cukup diwakili oleh jumlah anggota namun juga perlu mempertimbangkan mengenai kompetensi, pengalaman dan pengetahuan yang memadai dari masing-masing anggota komite audit.

5.4.5 Komisaris Independen dan Komite Audit (*Corporate Governance*) sebagai Variabel Moderasi Memperlemah Pengaruh Manajemen Laba Riil Terhadap Agresivitas Pajak

Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam rangka *good corporate governance* mengatur tentang keberadaan komisaris independen. Yahya Harahap (2013) berpendapat bahwa dengan adanya Komisaris independen, diharapkan jalannya pengurusan dan kebijakan Perseroan Terbatas akan lebih bersifat transparan, adil dan bertanggung jawab, baik terhadap pemegang saham maupun kepada pemangku kepentingan lainnya, yakni masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya dalam peraturan yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia juga diatur keberadaan Komite Audit yang terlihat dari formulir pendaftarannya. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa komisaris independen dan komite audit (*corporate governance*) pada tindakan manajemen laba riil tidak berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil ini tidak sejalan dengan

temuan oleh Radifan dan Etna (2015) Komisaris independen melakukan monitoring terhadap kinerja direksi yang dipimpin oleh direktur dan bertindak secara independen tanpa adanya pengaruh dari pihak-pihak yang ada dalam perusahaan. Rosidy dan Rahadi (2019) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan maka pengawasan perusahaan juga akan semakin besar, maka manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan lebih transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga meminimalkan terjadinya agresivitas pajak. Novitasari (2017), Putri dan Anis (2017) dengan adanya pengawasan dari komite audit yang intensif, maka informasi yang diberikan perusahaan akan lebih akurat dan berkualitas sehingga kemungkinan perusahaan melakukan pengaturan terhadap beban pajaknya cenderung kecil.

Manajemen lebih memilih menggunakan manajemen laba riil karena manajemen laba riil kurang menarik perhatian auditor dan regulator. Sebagaimana penelitian Ratmono (2010) yang berhasil membuktikan bahwa manipulasi aktivitas riil perusahaan-perusahaan di Indonesia, yang merupakan keputusan operasional tentang produksi, penentuan harga, dan pemotongan beban-beban diskresionari, tidak mendapat perhatian dari auditor. Berdasarkan temuan oleh Geraldina (2013), Nugroho dan Amrie (2017) menemukan bahwa manajemen laba riil melalui deskresi arus kas operasi dan biaya produksi menaikkan kemungkinan perusahaan terlibat dalam kegiatan agresivitas pajak.

Keberadaan komisaris independen dan komite audit diharapkan dapat mengurangi praktik yang tidak sehat dalam pengelolaan perusahaan guna menjamin *good corporate governance*. Dalam penelitian ini, ternyata keberadaan komisaris independen dan interaksinya dengan manajemen laba riil tidak memperl lemah perilaku agresivitas pajak. Demikian juga keberadaan komite audit

dan interaksinya dengan manajemen laba riil tidak memperlemah perilaku agresivitas pajak.



BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pajak merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan di Indonesia. Peranan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak berimplikasi terhambatnya kinerja penerimaan negara dalam membiayai pembangunan. Perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia mempunyai kontribusi besar dalam penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Penelitian menyelidiki faktor kesulitan keuangan dan manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen yang dapat mengindikasikan tindakan agresivitas pajak. Studi ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hasil penelitian ini menemukan bukti empiris bahwa ketika perusahaan dalam kondisi kesulitan keuangan, maka manajemen akan mengambil keputusan mencari sumber dana yang cepat diperoleh dan risikonya belum terlihat. Dana yang paling gampang diperoleh adalah dana untuk pembayaran pajak. Perusahaan akan cenderung menggunakan utang sebagai modal dikarenakan utang dapat menimbulkan beban bunga, sehingga pendapatan kena pajak perusahaan menjadi berkurang. Namun penggunaan utang yang berlebih juga dapat menjadi beban bagi perusahaan dikemudian hari. Manajemen laba riil merupakan cara yang dipilih oleh manajemen dalam memanipulasi laba perusahaan dengan cara menyajikan informasi laba kepada publik yang sudah disesuaikan dengan kepentingan perusahaan dengan cara menaikkan atau menurunkan laba perusahaan, selain itu manipulasi aktivitas riil kurang menarik perhatian auditor dan regulator karena manajer memanipulasi aktivitas riil pada tahun berjalan. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa regulasi yang

dibuat regulator dalam rangka *good corporate governance* yang berkaitan keberadaan komisaris independen dan komite audit (yang salah satu anggotanya harus berasal dari komisaris independen) pada perusahaan *go public* ternyata dapat mempengaruhi perilaku agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Penerapan *corporate governance* yang baik yang diproksikan oleh dewan komisaris independen dan komite audit dapat menjadi mekanisme pengawasan dan pengendalian yang efektif untuk menghambat tindakan oportunistik manajer dalam mengelola perusahaan agar tidak melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat mencegah atau bahkan mengurangi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

6.2 Implikasi Penelitian

Implikasi teori, praktis, dan dalam hal kebijakan yang dapat diberikan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut;

6.2.1 Implikasi Teori

Penelitian ini memberikan tambahan bukti secara empiris mengenai, teori akuntansi positif, *trade off theory*, dan *agency theory*. Sejalan dengan teori akuntansi positif oleh Watts dan Zimmerman (1990) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan sampel melakukan manajemen laba riil untuk mencapai target laba, hal ini menaikkan kemungkinan perusahaan terlibat dalam kegiatan agresivitas pajak. *Trade off theory* oleh Modigliani dan Miller (1963) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika perusahaan berda dalam kondisi kesulitan keuangan, maka perusahaan akan cenderung menambah modal melalui utang, sehingga kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan, selain itu penggunaan utang juga dapat memperkecil pendapatan kena pajak perusahaan karena munculnya beban bunga dari penggunaan utang tersebut.

Penelitian ini mengonfirmasi *agency theory* yang menunjukkan bahwa komisaris independen dan komite audit dapat memperkecil masalah *agency* yang umumnya terjadi antara pemegang saham dan manajemen sehingga informasi yang diberikan perusahaan akan lebih akurat dan berkualitas, serta kemungkinan perusahaan melakukan pengaturan terhadap beban pajaknya cenderung berkurang.

6.2.2 Implikasi Praktis

Penelitian ini membuktikan bahwa kesulitan keuangan akan cenderung mempengaruhi manajemen untuk melakukan praktik agresivitas pajak. Penelitian ini juga membuktikan secara empiris bahwa regulasi yang dibuat regulator dalam rangka *good corporate governance* yaitu kewajiban adanya komisaris independen dan komite audit (yang salah satu anggotanya harus berasal dari komisaris independen) dalam setiap perusahaan yang masuk bursa, ternyata tidak berpengaruh untuk mereduksi praktik manajemen laba riil tapi mampu mereduksi untuk kesulitan keuangan. Perlunya pengawasan yang lebih komprehensif terhadap pelaksanaan regulasi yang dibuat pemerintah baik Bapepam maupun Kementerian Keuangan atas kapasitas dan kualitas komite audit, eksistensi komisaris independen dan komite audit tidak sekedar memenuhi proporsi jumlah, namun harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan perundang-undangan.

6.2.3 Implikasi Kebijakan

Mengingat pentingnya pajak sebagai sumber utama APBN, perlu dibuat kebijakan dalam rangka *good corporate governance* yang pro pembayaran pajak. Berdasar bukti empiris untuk tahun 2017 dan 2018, ternyata keberadaan komisaris independen mampu memoderasi terciptanya *good corporate*

governance di perusahaan manufaktur dalam hal perusahaan mengalami kesulitan keuangan, tetapi tidak mampu mereduksi perilaku manajemen laba riil. Maka perlu keputusan Manajemen Bursa Efek Indonesia terkait revisi peraturan I-A, yang tidak lagi mensyaratkan perusahaan yang ingin mencatatkan saham atau efek bersifat ekuitas, memiliki komisaris dan direksi independen kemungkinan sudah tepat. Revisi peraturan I-A itu diterbitkan pada 26 Desember 2018 dan mulai berlaku pada 27 Desember 2018 dengan nomor keputusan 00183/BEI/12-2018. Dalam rangka *good corporate governance* sangat dimungkinkan untuk masa mendatang, regulasi yang dibuat regulator tidak sekedar menentukan jumlah/kuantitas namun juga memperhatikan syarat kualitas serta ketentuan mengenai eksistensi komisaris independen dan komite audit.

6.3 Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini tidak luput dari keterbatasan atau kekurangan yang perlu disempurnakan dan ditindaklanjuti oleh penelitian-penelitian selanjutnya. Peneliti masih sulit untuk dapat menemukan komponen biaya *Research and Development (R&D)* untuk mengukur biaya diskresioner abnormal pada manajemen laba riil. Biaya diskresioner dalam laporan keuangan dari perusahaan yang menjadi sampel pengamatan, tidak ada rinciannya secara spesifik dalam laporan keuangan, sehingga peneliti hanya memasukan total biaya penjualan dan total biaya administrasi dan umum sebagai ukuran biaya diskresioner. Diperlukan penelitian yang komprehensif, untuk menilai kewajaran proporsi biaya diskresioner terhadap total biaya penjualan ditambah biaya administrasi dan umum.

Daftar Pustaka

Akhtar, Hanif, 2019. Catatan Mengenai Uji Normalitas : Jangan Panik jika Data Tidak Berdistribusi Normal. <https://www.semestapsikommetrika.com/>. Juni 2019.

Altman, I. E., 1968. Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. *The Journal of Finance*. Vol. 23, No. 4 p.589-609

Amri, Q. 2018. *RSPO Indonesia Dituding Hindari Pembayaran Pajak Rp 8 Miliar/Tahun*. <https://sawitindonesia.com/>. April 2020.

Anonim. 2013. *Good Corporate Governance*. <https://arsasi.wordpress.com>. November 2019.

Anonim. 2015. *Teori Akuntansi Positif*. <http://nichonotes.blogspot.com/>. Januari 2020.

Anonim. 2015. *Good Corporate Governance*. <http://www.oecd.org/>. Januari 2020.

Anonim. 2018. *Rangkuman Undang-Undang Pajak Penghasilan Terbaru*. <https://www.online-pajak.com/>. April 2020.

Anonim. 2019. *Kerisis Keuangan Asia Di Indonesia*. <https://Indonesia-investment.com>. Oktober 2019.

Arief, R.A., Pratomo, D. dan Dillak, V.J. 2016. Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Batubara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014). *E-Proceeding Of Management*. Vol. 3, No. 3 p.3366

Brigham, E.F. dan Houston, J.F. 2011. *Manajemen Keuangan*. Edisi Kedelapan. Salemba Empat. Jakarta.

Chen, S., Chen, X. dan Shevlin, T. 2010. Are Family Firm More Tax Aggressive Than Non Family Firms. *Journal of Financial Economics*. Vol.71, No.1 p.41-61

Christiana dan Fernando, A. 2017. Peran Corporate Governance Sebagai Pemoderasi Atas Pengaruh Agresivitas Pelaporan Keuangan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *Jurnal Akuntansi STIE*, Februari 2017.

Cita, I.G.A. dan Supadmi, N. 2019. Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance pada Praktik Tax Avoidance. Vol. 29, No.3 p.912-927

Cohen, D. Dan Zarowin, P. 2010. Accrual Based And Real Earnings Management Activities Around. *Journal Of Financial Economics*. Juni 2008

- Crowson, Mike. 2018. Weighted Least Squares Regression in SPSS using a standard deviation function to re-weight observations. www.youtube.com/. Oktober 2018
- Diantari, P.R. dan Ulupui. 2016. Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.16, No.1 p.702-732
- Dolorosa, G.N. 2014. Januari 2015, *Saham Davomas Delisting dari BEI*. <https://market.bisnis.com/>. Januari 2020
- Edwards, A., Schwab, C. dan Shevlin, T. 2012. *Financial Constraints and the Incentive for Tax Planning*, <https://doi.org>. Januari 2020.
- Fariana, H. 2019. *Djp Dalami Dugaan Penghindaran Pajak Pt Adaro Energy*, <https://tirto.id>. November 2019.
- Fibrininta, C.N. dan Sylvia, V.S. 2014. Manajemen Laba Akruai, Manajemen Laba Riil, dan Biaya Modal. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Vol. 5, No. 3 p. 365-379
- Frank, M.M., Luann, J.L. dan Sonja, O.R. 2008. Tax Reporting Aggressiveness And Its Relation To Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, Juli 2008.
- Geraldina, I. 2013. Preferensi Manajemen Laba Akruai Atau Manajemen Laba Riil Dalam Aktivitas Tax Shelter. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*. Vol.10, No.2 p.206-224
- Ginting, N.M.R. dan Elly, S. 2018. Pengaruh Manajemen Laba Dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016). *E-Proceeding of Management*. Vol.5, No.2 p.2286
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*, Edisi kelima. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Graham, J., Michael, L.L. dan James, S.S. 1998. Debt, Leases, Taxes, and the Endogeneity of Corporate Tax Status. *The Journal of Finance*, Februari 1997.
- Gunawan, J. 2017. Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 21, No. 3 p.425-436
- Gunny, K. 2005. What Are the Consequences of Real Earnings Management?. *Haas School of Business*, Januari 2005.
- Hanafi, J. dan Ririn, B. 2016. Peran Mekanisme Good Corporate Governance dalam Mencegah Perusahaan Mengalami Financial Distress. *Jurnal Online Insan Akuntan*. Vol.1, No.1 p.195-220

Hanifah, O.E. dan Agus, P. 2013. Pengaruh Corporate Governance dan Financial Indicators terhadap Kondisi Financial Distress. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol.2, No.2 p.1

Hanum, H.R. dan Zulaikha. 2013. Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol.2, No.2 p.1-10

Hapsoro, D. dan Adrianus, B.H. 2016. Keberadaan Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi Pengaruh Financial Distress Terhadap Earning Management. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol.19, No.1

Hartono, J. 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Edisi Keenam. BPFE. Yogyakarta.

Helena, S. dan Muhammad, S. 2018. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Financial Distress. *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol.60, No.2

Hendriyani, R. dan Afrizal, T. 2015. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Vol. 22, No. 1 p.25-33

Henny. 2019. Pengaruh Manajemen Laba dan Karakteristik Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*. Vol 3, No.1 p.36-46

Hidayat, Anwar. 2016. Pengertian Multikolinearitas dan Dampaknya. www.statistikian.com/. November 2016.

Jensen, M.C. dan Meckling, W. 1976. Theory of the Firm, Managerial Behavior, Agency, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economic*. Vol. 3, No.4 p.305-360.

Karinda, W.D. 2018. Pengaruh Penghindaran Pajak Yang Dimoderasi Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2014-2017). Vol.6, No.3 p.2466

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak. 2013. *Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya*. <https://www.kemenkeu.go.id/>. Januari 2020

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak. 2018. *Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak 2018*. <https://www.pajak.go.id/>. April 2020.

Kusumawati, Eny. 2015. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Riil*. Thesis, Program Studi Magister Manajemen, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Lanis, R. dan G. Richardson. 2012. "Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis". *J. Account. Public Policy*, pp.86-108.

Lestari, N. dan Selvy, A.N. 2018. Pengaruh Manajemen Laba dan Tax Avoidance terhadap Nilai Perusahaan dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Applied Accounting and Taxation*. Vol. 3, No.1 p.99-109

Lolana, F.L. dan Susi, D. 2019. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Dengan Tax Avoidance Sebagai Variabel Intervening. *Prosiding Seminar Nasional Pakar 2019 Buku II*. 2615-2584

Mdigliani, F., and Miller, M.H., 1963, "Corporate Income Taxes and Cost of Capital", *American Economic Review*.

Meilia, P dan Adnan. 2017. Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Jakarta Islamic Index. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. Vol.2, No.4 p.84-92

Murhadi. 2009. Studi Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Praktik Earnings Management Pada Perusahaan Terdaftar Di Pt Bursa Efek Indonesia. *ResearchGate*, Januari 2009.

Mutamimah dan Rita. 2009. Keputusan Pendanaan: Pendekatan *Trade-Off Theory* dan *Packing Order Theory*. *Ekobis*. Vol.10, No.1 p.241-249

Napitupulu, R. 2012. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 14, No. 2 p.61-78

Naptali, Y. 2007. Econometric : Heterokedastisitas. www.yohanli.com/. Desember 2007

Ningsih. 2015. *Earning Management* Melalui Aktivitas Riil Dan Akruai. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*. Vol. 16, No.1 P 55

Novitasari, S. 2017. Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, Dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2010-2014). *JOM Fekon*, Februari 2017.

Nugroho, S. dan Amrie, F. 2017. Pengaruh Financial Distress, Real Earnings Management Dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness. *Journal Of Business Administration*. Vol. 1, No. 2 p.163-182

Nurhandono, F. dan Amrie, F. 2017. Lindung Nilai, Financial Leverage, Manajemen Laba dan Agresivitas Pajak. *Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi*. Vol.17, No.1 p.31-52

Octaviani, R.R. dan Sofie. 2018. Pengaruh Good Corporate Governance, Capital Intensity Ratio, Leverage, dan Financial Distress terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2017. *Jurnal Akuntansi Trisakti*. Vol.5, No.2 p.253-268

Pascal Smart Consulting. 2009. *Regresi Linier dengan Variabel Moderating*.
<https://www.konsultanstatistik.com/>. Maret 2009.

Pitoyo, B.S., Nurmala, A., dan Suyanto. 2019. Manajemen Laba, Tindakan Pajak Agresif, dan Peran Tata Kelola Perusahaan : Studi pada Perusahaan di Jakarta Islamic Index. *Journal of Islamic Economics, Business and Finance*. Vol.9, No.1 p.23-37

Platt, H.D dan Platt, M.B. (2002). Predicting corporate financial distress : reflections on choice-based sample bias. *Journal of Economics and Finance*. Vol. 26, No.2 p.184-99

Pratiwi, H.R. 2018. *Kronologi kisruh keuangan Garuda Indonesia*.
<https://www.cnnindonesia.com/>. Oktober 2019.

Puri, A.R. dan Gayatri. 2018. Good Corporate Governance Memoderasi Pengaruh Financial Distress Terhadap Manajemen Laba. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 23, No.1 p.489-512

Putra, R. dan Elly, S. 2018. Pengaruh Manajemen Laba, Leverage, Dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2012-2016). Vol.5, No.3 p.3491

Putri, R.A.H dan Anis, C. 2017. Pengaruh Financial Distress Dan Good Corporate Governance Terhadap Praktik Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 6, No. 2 p.1-11

Putri, V.R. 2018. Keterkaitan Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016). *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan*. Vol. 4, No.1 p.20-28

Radifan, R. dan Etna. 2015. Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kemungkinan Financial Distress. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol.4, No.3 p. 1-11

Rani, P. 2017. Pegaaruh Ukuran Perusahaan, Financial Distress, Komite Audit, Dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 - 2016). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Oktober 2017.

Ratna, I. dan Marwati. 2018. Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Financial Distress Pada Perusahaan Yang Delisting Dari Jakarta Islamic Index Tahun 2012 – 2016. Vol.1, No.1 p.51-62

Rebecca, Y. 2012. Pengaruh Corporate Governance Index, Kepemilikan Keluarga, dan Kepemilikan Institusional terhadap Biaya Ekuitas dan Biaya Utang. *Conference Paper*. September 2012.

Resmi, S. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi Kedelapan. Salemba Empat. Jakarta.

Riadi, M. 2018. *Financial Distress (Kesulitan Keuangan)*, <https://kajianpustaka.com>. Oktober 2019.

Richardson, G., Grantley, T. dan Roman, L. 2015. The Impact Of Financial Distress On Corporate Tax Avoidance Spanning The Global Financial Crisis: Evidence From Australia. *Economic Modelling*. Vol.44 p.44-53

Rosidy, D. dan Rahadi, N. 2019. Pengaruh Komisaris Independen dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Info Artha*. Vol. 3, No.1 p.55-65

Roychowdhury, S. 2006. Earning Management Through Real Activities Manipulation. *Journal of Accounting and Economics*, Juni 2006.

Rusydi, M.K. dan Dwi, M. 2014. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Aggressive Tax Avoidance. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*

Sahid, Raharjo. 2014. Tutorial SPSS. <http://www.spssindonesia.com>. April 2020.

Saputra, M., Nadirsyah., dan Hilfi, H. 2017. The Influence Of Ownership Structures, Financial Distress, And Tax Loss Carry Forward On Tax Avoidance (Sturdy On Manufacturing Company Listed In Indonesia Stock Exchange). *Journal Of Resources Development And Management*. Vol.31

Scott, W.R. 2015. *Financial Accounting Theory*, (7th ed). Pearson. Toronto.

Sekaran, U. dan Bougie, R. 2017. *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Edisi Keenam. Salemba Empat. Jakarta Selatan.

Sidik, S. 2019. AISA Tersandung Penggelembungan Dana, KAEF Siap Right Issue. <https://www.cnbcindonesia.com/>. Januari 2020

Silvia, Y.S. 2017. Pengaruh Manajemen Laba, Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Equity*. Vol. 3, No. 4

Styawan, A. 2019. *Lion Air Kesulitan Keuangan, Sempat Tunda Bayar Jasa Ke AP 1*. <https://www.cnnindonesia.com/>. November 2020.

Sugianto, D. 2018. Dwi Aneka Jaya Kemasindo Didepak dari Bursa Saham. <https://finance.detik.com/>. Juli 2021

Sukirno. 2015. Unitek Go Private: Ini 6 Alasan Perusahaan Keluar dari BEI. <https://market.bisnis.com/>. Januari 2020.

Sulastri, S. dan Yane, D.A. 2018. Pengaruh *Financial Distress* Dan Leverage Terhadap Konservatisme Akuntansi. *Akuisisi Jurnal Akuntansi*. Vol.14, No.1

Suprpti, Eny. 2017. Pengaruh Tekanan Keuangan terhadap penghindaran pajak

